



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM UPAYA  
PENAGGULANGAN KEMISKINAN : SEBUAH STUDI TERHADAP  
PNPM-MP DI NAGARI BATU BULEK  
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA**

**TESIS**



**LINDA SAFITRA  
0821218005**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**



**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN : SEBUAH STUDI TERHADAP  
PNPM-MP DI NAGARI BATU BULEK  
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA**

**OLEH :**

**LINDA SAFITRA  
08 21 21 8005**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Sosiologi  
Program Studi Sosiologi Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**



**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN KEMIKINAN : SEBUAH STUDI TERHADAP  
PNPM-MP DI NAGARI BATU BULEK KECAMATAN. LINTAU BUO  
UTARA**

**LINDA SAFITRA**  
**0821218005**

Dibawah Bimbingan Prof. Dr.Afrizal,MA, dan Dr.Asmawi,MS

**RINGKASAN TESIS**

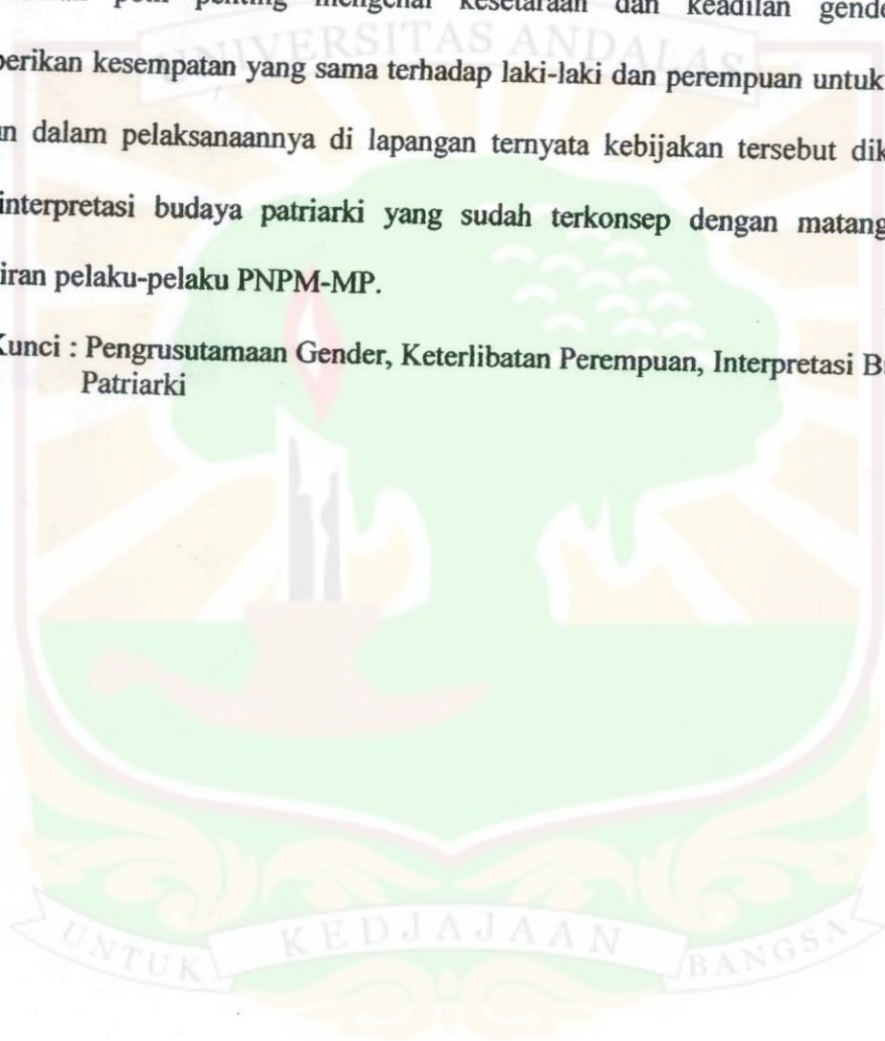
Penelitian ini mendeskripsikan tentang pengarusutamaan gender dalam PNPM-MP dan faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam PNPM-MP. Fokus penelitian ini pada tahapan perencanaan PNPM-MP anggaran 2010. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Guna memahami dan menganalisis persoalan penelitian maka digunakan teori interaksionisme simbolik. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposiv..* Pengumpulan data didapat melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan perencanaan PNPM-MP tidak terwujud secara maksimal. Karena ditemukan rendahnya keterlibatan perempuan dalam mengemukakan pendapat, saran, dan tingkat kehadiran dalam rapat. Dalam hal pengambilan keputusan, perempuan juga belum terwakili secara adil. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan pada kegiatan perencanaan PNPM-MP di Nagari Batu Bulek masih rendah.



Pelibatan perempuan pada kegiatan perencanaan PNPM-MP ditentukan oleh interpretasi pengelola dan pelaku-pelaku program terhadap laki-laki dan perempuan. Interpretasi mereka bersumber dari budaya patriarki, yang cenderung lebih mengutamakan laki-laki. Akibatnya, walaupun dalam setiap kebijakan PNPM-MP menekankan poin penting mengenai kesetaraan dan keadilan gender yang memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan untuk terlibat. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata kebijakan tersebut dikalahkan oleh interpretasi budaya patriarki yang sudah terkonsep dengan matang dalam pemikiran pelaku-pelaku PNPM-MP.

**Kata Kunci :** Pengrusutamaan Gender, Keterlibatan Perempuan, Interpretasi Budaya Patriarki







No. Alumni Unaud	Linda Safitra	No. Alumni Pascasarjan
a).Tempat/Tanggal Lahir: Buo/22 November 1984 b). Nama Orang Tua: Bapak Aipda Mardius, Ibu Yuhelmi S.Pd S, c). Program Studi: Sosiologi, d). Fakultas: Pascasarjana, e) No. BP. 0821218005, f) Tanggal Lulus 31 Agustus 2010, g) Prediket Lulus: Memuaskan, h) IPK: 3,25, i) Lama Studi: 24 bulan, j) Alamat: Jr. Imam Bonjol Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.		

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN : SEBUAH STUDI TERHADAP PNPM-MP DI NAGARI BATU BULEK KECAMATAN LINTAU BUO UTARA**

Oleh: LINDA SAFITRA / 08 212 18 006

(Di bawha bimbingan Prof. Dr. Afrizal, MA dan Dr. Asmawi, MS)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang : pengarusutamaan gender dalam PNPM-MP dan faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam PNPM-MP. Fokus penelitian ini adalah tahapan perencanaan PNPM-MP anggaran 2010. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk memahami persoalan penelitian maka digunakan teori interaksionisme simbolik. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive*. Pengumpulan data didapat melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan perencanaan PNPM-MP belum bisa terwujud secara maksimal. Hal ini ditunjukan dengan masih rendahnya keterlibatan perempuan baik secara kualitas (berbicara mengemukakan pendapat, saran, dan pengambilan keputusan) maupun kuantitas (tingkat kehadiran). Keterlibatan perempuan dalam kegiatan perencanaan PNPM-MP cenderung dijadikan sebagai syarat berlangsungnya musyawarah yang akan dilakukan. Peran perempuan dalam organisasi PNPM-MP masih diidentikan dengan tugas perempuan sehari-hari. Dalam hal pengambilan keputusan, perempuan juga belum terwakili secara adil. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan pada kegiatan perencanaan PNPM-MP di Nagari BatuBulek masih rendah. Dari hasil analisis ternyata pemikiran-pemikiran yang bersumber dari interpretasi budaya patriarki yang telah melahirkan keterbatasan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan PNPM-MP.

Kata Kunci : Pengrusutamaan Gender, Keterlibatan Perempuan, Interpretasi Budaya Patriarki

Tesis ini telah dipertahankan didepan siding penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Agustus 2010, abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda tangan					
Nama Terang	Prof. Dr. Afrizal, MA	Dr. Asmawi, MS	Prof. Dr. Damsar, MA	Dr. Azwar, M.Si	Drs. Alfitri, M.S

Mengetahui:

Ketua Program Studi: Dr. Azwar, M.Si  
Nama

Tanda Tangan

	Petugas Pascasarjana/Universitas
No. Alumni Pascasarjana (Magister Sains)	Nama : Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama : Tanda Tangan:



**Judul : Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Studi Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar**

**Nama Mahasiswa : Linda Safitra**


**Nomor Pokok : 0821218005**

**Program Studi : Sosiologi**

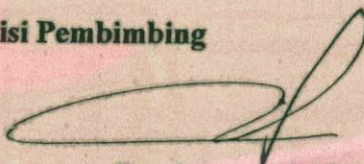
Tesis ini telah di uji dan dipertahankan di depan panitia ujian akhir Magister Sains pada program Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Agustus 2010.

**Menyetujui:**

**1. Komisi Pembimbing**

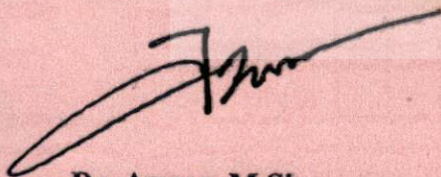


**Prof. Dr. Afrizal, MA**  
Ketua



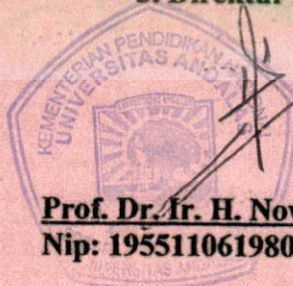
**Dr. Asmawi, MS**  
Anggota

**2. Ketua Program Studi Sosiologi**



**Dr. Azwar, M.Si**  
Nip: 196712261993031001

**3. Direktur Program Pascasarjana**



**Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc**  
Nip: 195511061980331001



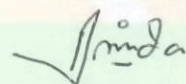
## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul :

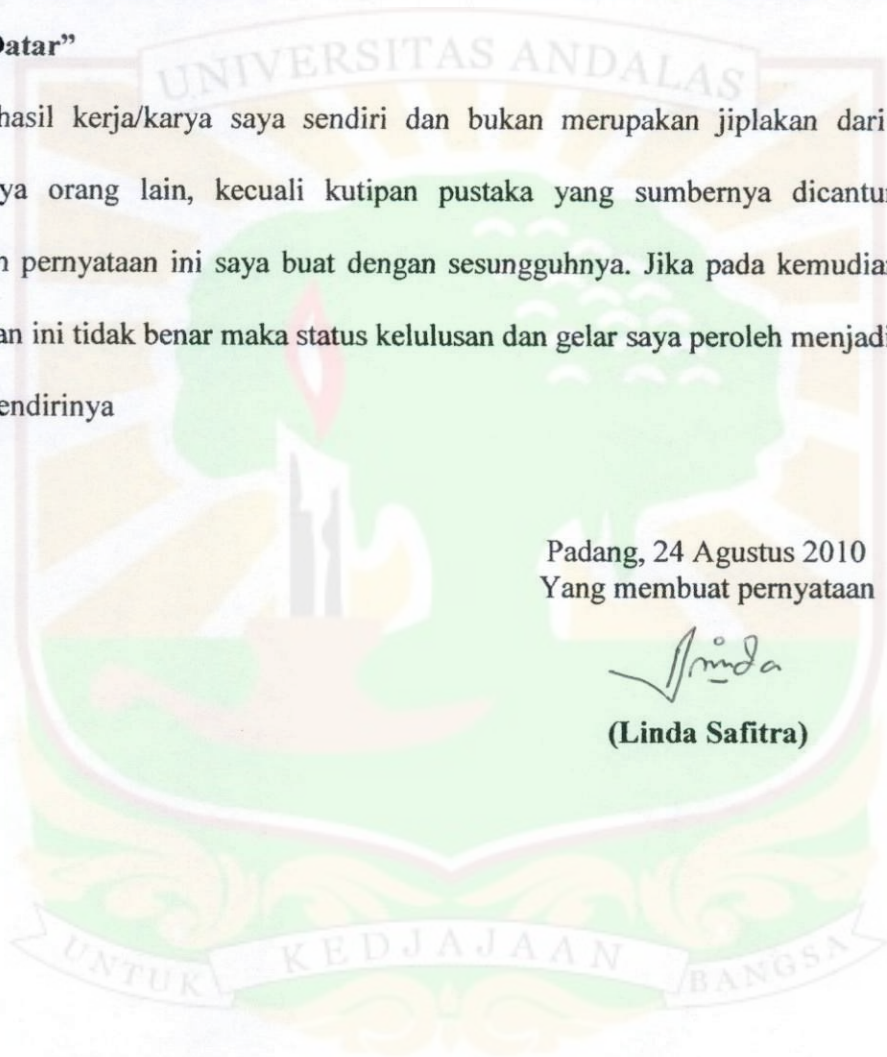
**“Pengarusutamaan Gender Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan : Sebuah Studi Terhadap PNPM-MP Di Nagari Batu Bulek Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar”**

Adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan pustaka yang sumbernya dicantumkan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Jika pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka status kelulusan dan gelar saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya

Padang, 24 Agustus 2010  
Yang membuat pernyataan



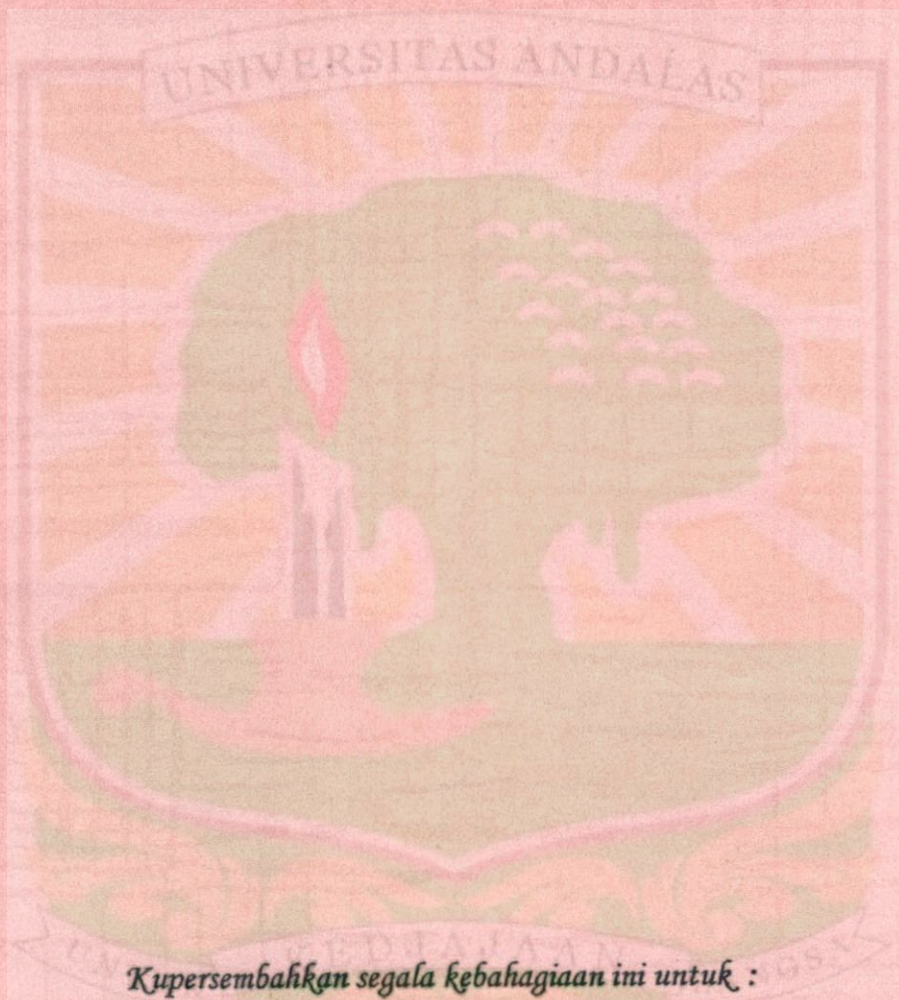
**(Linda Safitra)**





## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

♪ *Hidup adalah belajar untuk menerima kenyataan yang ada di hadapan kita tanpa adanya rasa keterpurukan, kekhawatiran, kesah dan penyesalan (Linda)*



*Kupersembahkan segala kebahagiaan ini untuk :*

- Ø Yang terkasih dan tersayang (Ama dan Apa tercinta)
- Ø Udaku Rjo dan adekku Danny tersayang
- Ø Yodi yang selalu membantu dalam pembuatan tesis ini
- Ø Teman-teman angkatan 2008 Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas
- Ø Almamater Ku



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Linda Safitra lahir di Buo 22 November 1984. Anak ke 2 (dua) dari 3 bersaudara dari Bapak Aipda Mardius dan Yuhelmi S.Pd. Menamatkan Sekolah dasar tahun 1997, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tahun 2000, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tahun 2003, dan melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tamat pada tahun 2008. Pada tahun 2008 tersebut kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di Program Studi Sosiologi, Pascasarjana Universitas Andalas Padang.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'allaikum Wr.Wb*

Seraya memanjatkan Puji Syukur kehadiran Illahhirobbi, setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya proses pembuatan tesis dengan judul **“Pengarusutamaan Gender Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan : Sebuah Studi Terhadap PNPM-MP Di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara”**, dapat diselesaikan dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains di Fakultas Pascasarjana, Universitas Andalas.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tesis ini masih jauh dari sempurna, sebagai akibat dari pengalaman dan pengetahuan peneliti yang terbatas. Namun demikian peneliti sangat merasakan bahwa hal itu merupakan pendorong untuk dapat melangkah lebih maju dalam menempuh dan menggali ilmu pengetahuan lebih lanjut.

Selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, do'a serta pengarahan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu sudah selayaknya peneliti dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat tulus kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, do'a, cinta, kasih sayang yang tiada hentinya dengan sangat tulus kepada peneliti.

Perkenankan pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Afrizal,MA selaku Pembimbing I (satu) dan Bapak Dr. Asmawi, MS selaku Pembimbing II (dua) dalam penyusunan tesis ini yang telah memberikan dukungan, meluangkan waktu dan kesempatan untuk



memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada peneliti, sehingga tesis ini dapat diselesaikan,

2. Bapak Prof.Dr.Damsar,MA, Bapak Dr.Azwar,M.Si, dan Bapak Drs.Alfitri,MS selaku penguji yang telah memberikan masukan yang membangun terhadap peneliti,
3. Bapak Prof.Dr.H.Novirman Jamarun,M.Sc selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas,
4. Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan staf pengajar pada Jurusan Sosiologi Fakultas Pascasarjana Universitas Andalas.
5. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, terutama untuk semua pegawai pada Kantor Camat Lintau Buo Utara, dan Pegawai Kantor Wali Nagari Batu Bulek,
6. Tim Fasilitator, Ketua UPK beserta anggota, serta semua pihak dalam Organisasi PNPM-MP di Nagari Batu Bulek yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data serta informasi yang peneliti butuhkan,
7. Masyarakat Nagari Batu Bulek yang telah memberikan informasi, data serta dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman Pascasarjana Sosiologi khususnya Angkatan 2008, Elvawati (sulas), Asteria Primananda (Kak Aster), Firdaus (Daus), Sahnun Sahuri (Bang Sahnun), David (Bang David), Titi Wahyuni (Titi), Medi Rosdian (Bang Medi), Antonius (Bang Anton), Irfan (Bang Irfan), yang telah memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada peneliti. Terima kasih teman-teman. Bangga telah bergabung dan mengenal teman-teman semua.....

Akhir kata, semoga segala amal dan kebaikan dari semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Padang, Agustus 2010

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSYARATAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
RINGKASAN TESIS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii

### BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Penelitian.....	10
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	12

### BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan.....	13
2.2. Perempuan Dalam Perspektif Miangkabau.....	19
2.3. Konsep Gender .....	22
2.4. Pengarusutamaan Gender.....	26
2.5. Ketidakadilan Gender .....	29
2.6. Ukuran-Ukuran Ketidakadilan Gender .....	30
2.7. Budaya Patriarki Berpengaruh Terhadap Pelibatan Laki-Laki dan Perempuan .....	32
2.8. Konsep Kemiskinan .....	34
2.9. Landasan Teori.....	36

### BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian .....	40
3.2. Lokasi Penelitian .....	41
3.3. Teknik Pemilihan Informan .....	41
3.4. Unit Analisis .....	44
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.6. Analisa Data.....	46



#### **BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Nagari Batu Bulek .....	49
4.1.1. Keadaan Geografis Nagari Batu Bulek.....	49
4.1.2. Keadaan Demografi Nagari Batu Bulek.....	51
4.2. Kondisi Mutakhir Keterlibatan Perempuan Di Lokasi Penelitian.....	59
4.3. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).....	60
4.4. Pengarusutamaan Gender Dalam PNPM-MP .....	69
4.5. Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam PNPM-MP .....	73
4.6. Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Perempuan Dalam PNPM-MP.....	101

#### **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan.....	112
5.2. Saran.....	116

#### **DAFTAR PUSTAKA**

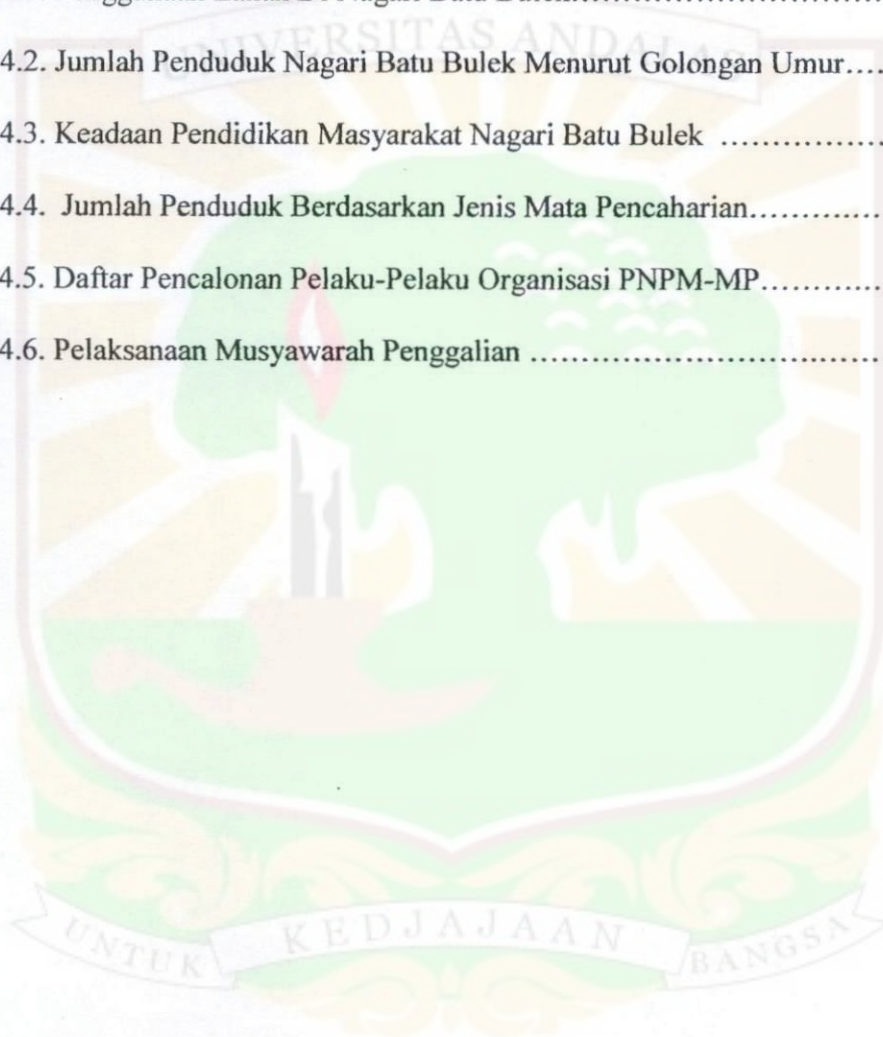
#### **LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Gender dan Seks.....	24
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	43
Tabel 3.2. Data Yang Akan Diambil dan Metode Yang Dipakai.....	46
Tabel 4.1. Penggunaan Lahan Di Nagari Batu Bulek.....	50
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Nagari Batu Bulek Menurut Golongan Umur.....	52
Tabel 4.3. Keadaan Pendidikan Masyarakat Nagari Batu Bulek .....	54
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian.....	55
Tabel 4.5. Daftar Pencalonan Pelaku-Pelaku Organisasi PNPM-MP.....	85
Tabel 4.6. Pelaksanaan Musyawarah Penggalan .....	89



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Panduan Wawancara

Lampiran II Dokumentasi Penelitian

Lampiran III Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah datar

Lampiran IV Surat Keterangan Penelitian dari Wali Jorong Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

Lampiran V SK Pembimbing





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan fenomena yang sudah mendunia, bahkan Negara Amerika Serikat yang terkenal dengan negara yang kuat dalam bidang ekonomi sekalipun, ternyata juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang ditakuti oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Walaupun sudah 65 tahun Bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka tetap saja masih dibelenggu oleh kemiskinan yang seakan-akan sulit dipisahkan dari bangsa ini. Masalah kemiskinan yang tidak henti-hentinya melanda negeri ini menuntut peran pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat untuk segera mengatasinya (Sherraden, 2006 : 13).

Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia terdapat di wilayah perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% (23,6 juta jiwa) berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Menurut Sudirja (2007) kemiskinan perdesaan tersebut merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan Indonesia.

Menyadari hal itu, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa



Tertinggal (P3DT), Program Pusat Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD), Supra Insus, dan Kredit Usaha Tani (KUT),.

Akan tetapi program-program penanggulangan kemiskinan yang telah diluncurkan pemerintah tidak efektif membebaskan masyarakat miskin dari kemiskinannya. Menurut hasil penelitian dari Afrizal dkk, kegagalan program-program penanggulangan kemiskinan pemerintah selama ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ; pertama, penyebab yang berkaitan dengan sifat program; kedua, penyebab yang berkaitan dengan pengelolaan program; ketiga, penyebab yang berkaitan dengan partisipasi lembaga dan tokoh-tokoh lokal (Afrizal, dkk 2006 : 106)

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan-kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini sedikit banyak memang disebabkan oleh ketiga faktor tersebut. Salah satu contoh adalah Program Pengembangan Keuangan Mikro yang diberikan kepada petani peladang, petani pesawah dan komunitas miskin lainnya dalam bentuk simpan pinjam yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah tidak bermanfaat untuk jangka panjang, berdasarkan hasil penelitian Afrizal, dkk (2006) kegagalan program ini disebabkan oleh dana simpan pinjam yang dikembangkan dengan bentuk kelompok simpan pinjam tidak bertahan lama. Penyebab utamanya adalah kelompok simpan pinjam yang telah dibentuk tersebut cepat bubar karena sering terjadi kemacetan dalam pengembalian.

Selain ketiga faktor di atas, kegagalan program-program penanggulangan kemiskinan juga diakibatkan karena pelaksanaan program kurang memperhatikan permasalahan gender. Perlu ditekankan bahwa kemiskinan merupakan masalah



kompleks yang bukan saja berkaitan dengan tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, dan kondisi lingkungan, tetapi di dalamnya juga terdapat permasalahan gender (Syukrie, 2003).

Menurut Arun, (2008 ) gender merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena selama ini terdapat kesenjangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perempuan sebagai kelompok mayoritas dalam masyarakat Indonesia belum mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung bersifat patriarkis dan tidak responsif gender, sehingga secara sistematis telah meminggirkan perempuan. Akibatnya program-program penanggulangan kemiskinan secara formal seringkali dikuasai laki-laki dan karena sumber daya yang penting dalam kehidupan selalu dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik lebih kuat, maka adanya marginalisasi terhadap keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan seringkali terabaikan. Sebagai contoh, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki. Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki. Beberapa studi dilakukan untuk membahas bagaimana program



pembangunan telah meminggirkan sekaligus memiskinkan perempuan. Seperti Program revolusi hijau yang memiskinkan perempuan dari pekerjaan di sawah yang menggunakan ani-ani (Mafruhah, 2009 73).

Dalam hal kemiskinan, perempuan mempunyai persepsi yang lebih beragam dibanding dengan laki-laki. Disamping terhadap aspek yang berhubungan dengan kualitas kesehatan, pangan serta peluang atau kesempatan, juga mencermati hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga sejahtera atau miskin dalam masyarakat seperti keharmonisan keluarga, rasa aman, ada tidaknya hubungan dengan rentenir, gaya hidup, kemampuan orang tua, membantu orang lain, penyelenggaraan pesta yang meriah atau tidak, serta hubungan dengan tetangga. Dalam kaitannya dengan penyebab kemiskinan, antara laki-laki dan perempuan tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti. perbedaan yang muncul adalah perempuan berpendapat bahwa suami yang memiliki lebih dari satu istri dan memiliki anak yang banyak dinilai sebagai penyebab terjadinya kemiskinan. Sementara itu laki-laki menganggap ketidakcukupan pangan dan hutang sebagai dampak kemiskinan, sedangkan perempuan lebih melihat aspek meningkatnya anak putus sekolah dan kriminalitas sebagai dampak kemiskinan. Adanya partisipasi aktif perempuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan tentu akan mempercepat proses penanggulangan kemiskinan (Mafruhah, 2009 : 74).

Keberhasilan program pengetasan kemiskinan yang melibatkan perempuan telah dibuktikan oleh Muhammad Yunus peraih Nobel Perdamaian 2006, dimana melalui Grameen Banknya ia berhasil menekan angka kemiskinan di Bangladesh dengan menjadikan kaum perempuan sebagai nasabah terbesarnya (sekitar 96%).



Kemudian mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Kofi Anan pernah berucap bahwa suatu negara tidak dapat membangun dengan menekan energi, kreatifitas dan produktivitas separuh populasi penduduknya, yaitu perempuan. Selanjutnya berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bank Dunia di beberapa lokasi khusus di perdesaan juga menemukan bahwa umumnya perempuan lebih disiplin serta lebih berhasil dalam mengelola usaha makro (Mafruhah, 2009: 74)

Menurut Sudjarwo (2007) terdapat tiga alasan penting perlunya keterlibatan perempuan dalam pembangunan ; pertama, karena perempuan mempunyai kepentingan yang sama dalam pembangunan, dan juga merupakan pengguna hasil pembangunan, yang mempunyai hak sama dengan laki-laki; kedua, perempuan juga memiliki kepentingan yang khusus sifatnya bagi perempuan itu sendiri dan anak-anak yang kurang optimal jika digagas oleh laki-laki karena membutuhkan kepekaan yang sifatnya khusus, terkait dengan keseharian, sosio kultural yang ada; ketiga memberdayakan dan melibatkan perempuan dalam pembangunan, secara tidak langsung akan juga memberdayakan dan menularkan semangat yang positif kepada generasi penerus, yang pada umumnya dalam keseharian sangat lekat dengan sosok ibu, perempuan yang mengasuh mereka.

Indonesia tidak akan mampu mengurangi kemiskinan jika tidak menghilangkan diskriminasi gender. Tanpa kesetaraan gender, kemiskinan tidak mungkin dapat diatasi sepenuhnya. Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterlibatan perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, kesempatan yang sama dan partisipasi penuh dan adil antara laki-laki dan perempuan sebagai agen pembangunan berkelanjutan Susanti (2002). Menurut Syukrie (2003 cara strategis



untuk menanggulangi kemiskinan adalah menciptakan budaya setara dan adil gender serta kebijakan yang sensitif gender. Perempuan harus diberlakukan secara terhormat dan dihargai sama dengan yang didapat laki-laki.

Secara normatif, Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi penegasan bahwa setiap warga negara (laki-laki dan perempuan) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan. Secara formal kesetaraan antara laki-laki juga mendapat pengesahan dengan diterbitkannya: *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984* tentang “Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan (Sudirja : 2007).

Pada perkembangannya, dalam deklarasi *Millenium Development Goals* (MDG's) atau tujuan pembangunan millennium yang disepakati oleh 189 negara dengan tegas menganjurkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Bambang, 2008).

Berkaitan dengan masuknya Indonesia sebagai negara anggota PBB, maka Indonesia mempunyai tanggungjawab moral untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan MDGs, pemerintah Indonesia telah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan dalam program pembangunan (Mafruhah, 2009:77).

Pengarusutamaan gender merupakan faktor yang juga harus diperhatikan apabila akan dilakukan target pengentasan kemiskinan dengan angka penurunan 50%



pada tahun 2015 (Mafruhah, 2009:74). Menyadari hal itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan kebijakan program yang lebih memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender sebagai pondasi utama pengarusutamaan gender mempunyai prinsip dasar dalam pelaksanaan PMPM MP.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender, maka di dalam PNPM Mandiri Perdesaan, diberlakukan 25 persen dari dana bergulir yang diambil dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) harus dikelola oleh kaum perempuan. Kaum perempuan juga diberikan peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang menjadi menu utama pemberdayaan masyarakat yaitu antara lain; dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar yang berbasis padat karya, pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat, pelatihan keterampilan usaha produktif, pemanfaatan akses pada sumber informasi, dan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya (Sujana, 2007).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sudah dilaksanakan hampir diseluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang sangat mendukung program ini. Fakta ini didukung dengan adanya data yang menyatakan bahwa semua kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat melaksanakan PNPM Mandiri. Semua kabupaten tersebut juga tidak ada yang termasuk dalam daftar lokasi yang bermasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan ([www.pnpm-mandiri.org](http://www.pnpm-mandiri.org)).



Salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan dan mendukung PNPM-MP adalah Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan Lintau Buo Utara termasuk dari 6 kecamatan yang melaksanakan PNPM-MP. Di kecamatan ini terdapat 5 Nagari yang menjalankan PNPM-MP salah satunya adalah Nagari Batu Bulek. Dalam perjalannya, pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Lintau Buo Utara sudah dua kali mendapatkan penghargaan. Pada tahun 2008, Kecamatan Lintau Buo Utara mendapatkan penghargaan sebagai UPK terbaik dari Mendagri, kemudian pada tahun 2009 pelaksanaan PNPM-MP kecamatan ini juga mendapatkan penghargaan pada tingkat provinsi dari Gubernur Sumatera Barat.

Berpedoman pada prinsip dasar dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), yaitu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dimana dalam implementasinya di lapangan PNPM-MP didorong untuk lebih memperhatikan akses, peluang, kesempatan perempuan untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik secara kuantitas (kehadiran), maupun kualitas (pengambilan keputusan). Keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Lintau Buo Utara tentu juga tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut.

Masih sedikitnya penelitian mengenai program penanggulangan kemiskinan yang memperhatikan masalah gender membuat peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pengarusutamaan Gender Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan". Penelitian ini akan dilakukan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Nagari Batu Bulek.



Berasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemikiran-pemikiran yang bersumber dari interpretasi budaya patriarki berkembang dalam tahapan perencanaan PNPM-MP. Pemikiran tersebut tersebut berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan, baik secara kualitas (mengemukakan pendapat dan pengambilan keputusan), maupun secara kuantitas (kehadiran).

Peran perempuan dalam struktur organisasi PNPM-MP juga masih sangat rendah. Perempuan lebih cenderung di tempatkan pada posisi “kedua” seperti bendahara, sekretaris dll, artinya perempuan belum diberi kesempatan untuk menduduki posisi-posisi strategis yang membuka akses, peluang, kesempatan kepada perempuan untuk terlibat lebih dari sekedar peran/posisi yang memang identik dengan kaum perempuan selama ini.

Penelitian tentang program penanggulangan kemiskinan pernah dilakukan oleh ; pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syahril tentang *Efektivitas Modal Dana bergulir Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Studi Kasus Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Padang*. Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang kemiskinan yang terjadi di kota padang memerlukan suatu upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tersebut, maka pemerintah meluncurkan program Dana Bergulir serta pengelolaan dana bergulir dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana bergulir oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dipilih langsung oleh masyarakat cukup berjalan dengan baik. Selain itu, efektivitas pinjaman modal dana bergulir secara



umum belum mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin (Syahrial, 2008).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh *Dela Latifa* tentang *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kota Padang (Studi : Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung)*. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi PNPM Mandiri di bidang pinjaman dana bergulir di Kelurahan Pampangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PNPM Mandiri pada program pinjaman dana bergulir ini sudah dapat dinilai berhasil. Hal ini dapat dilihat dari, *target group* yang tepat sesuai kriteria kemiskinan di Kelurahan Pampangan, prosedur pelaksanaan dan peminjaman yang sudah tepat, memberi manfaat bagi *target group* sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah (Latifa, 2009)

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini melihat permasalahan responsif gender dalam program penanggulangan kemiskinan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Menyadari pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaann (PNPM-MP). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah suatu instrument pemerintah yang digulirkan untuk mencapai poin dari MDGs (*Millenium Development Goals*) diantaranya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan. Akan tetapi belum ada penelitian yang mengungkapkan bagaimana perempuan dilibatkan dalam program tersebut.

Bertitik tolak dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)?
2. Faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berdasarkan interpretasi subyektif pelaku-pelaku dan pengelola PNPM-MP terhadap gender.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

##### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat secara teoritis yaitu :**

1. Bagi peneliti diharapkan berguna dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya ilmu Sosiologi Gender dan Sosiologi Pembangunan yang menyangkut masalah Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam upaya penanggulangan kemiskinan.



**b. Manfaat secara praktis yaitu :**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat nantinya dalam usaha peningkatan keterlibatan perempuan pada program-program pembangunan selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan**

Penduduk perempuan yang jumlahnya 49.9% (102.847.415) dari total (206.264.595) penduduk Indonesia (Sensus Penduduk 2000) merupakan sumberdaya pembangunan yang cukup besar. Partisipasi aktif wanita dalam setiap proses pembangunan khususnya dalam penanggulangan kemiskinan akan mempercepat proses penganggulangan kemiskinan. Kurang berperannya kaum perempuan, akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri. Kenyataannya dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan dibanding laki laki. Seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya pembangunan, sehingga manfaat pembangunan kurang diterima kaum perempuan (Susanti, 2002).

Pembangunan yang dilakukan seringkali belum berpihak kepada perempuan. Keterlibatan perempuan masih lebih banyak di sektor domestik dibandingkan dalam sektor publik. Perempuan, terutama dari kalangan miskin seringkali menjadi penerima informasi kedua karena tidak pernah/jarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang diselenggarakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat.

Berbagai upaya pembangunan nasional yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, ternyata belum dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.



Bahkan belum cukup efektif memperkecil kesenjangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga pembangunan nasional belum mencapai hasil yang optimal, karena masih belum memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara penuh. Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu Tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideology patriarki); Adanya kesenjangan pada kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan (Sudjarwo, 2007).

Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan (Mafruhah, 2009 : 73)

Untuk itu dalam proses pembangunan khususnya dalam upaya penganggulangan kemiskinan sangat diperlukan keterlibatan perempuan. Pemecahan masalah-masalah, terutama masalah kemiskinan yang menyangkut perempuan, akan lebih tepat apabila dibicarakan bersama dengan perempuan, karena merekalah yang betul-betul merasakan masalah dan kebutuhannya. Selama ini Keputusan yang diambil hanya oleh kaum lelaki seringkali hanya berhubungan dengan dunia lelaki dan tidak mempunyai sensitivitas terhadap masalah perempuan. Jikapun memikirkan

masalah perempuan, seringkali dasarnya tidak kuat, karena mereka tidak mengalami masalahnya (Sudjarwo, 2007).

Peran dan kedudukan perempuan dalam pembangunan mulai mendapat perhatian “serius” dari pemerintah dengan dimasukkannya isu perempuan dalam *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978* dan terbentuknya lembaga Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada akhir tahun 1999, dimana sebagai mitra sejajar pria, perempuan dapat lebih berperan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada intinya ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kemampuan perempuan sebagai sumberdaya insani pembangunan perlu ditingkatkan dan diarahkan secara bersungguh-sungguh melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, agar:
  - a. Perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya baik dalam keluarga maupun masyarakat;
  - b. Perempuan dapat lebih memanfaatkan kesempatan yang ada seoptimal mungkin;
  - c. Perempuan dapat berfungsi sebagai mitra sejajar pria di semua bidang dan proses pembangunan, utamanya berpartisipasi di bidang-bidang non tradisional (misalnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan).
2. Pemberian kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif sebagai mitra sejajar pria perlu ditunjang oleh sikap mental, perilaku, dan pandangan masyarakat



terhadap perempuan, terutama peran aktif di luar lingkungan keluarga dan rumah tangga.

3. Penyesuaian sistem dan struktur pranata sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik (Sudirja : 2007).

Dari sudut pandang gender, sebenarnya pembangunan berpeluang untuk mengapresiasi berbagai kontribusi perempuan terhadap berbagai aspek. Implementasinya seperti segala cakupan ekonomi, sosial, budaya dan pribadi melalui prioritas pada kepentingan pemberdayaan perempuan. Selain itu, perlunya peningkatan akses bagi perempuan dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Berbagai tantangan dihadapi perempuan dalam pembangunan antara lain:

- a. Perempuan belum terwakili secara adil dalam pengambilan keputusan. Struktur patriarki yang dominan di sebagian masyarakat tidak melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Berangkat dari pembuat keputusan yang dominan dalam keluarga adalah ayah sebagai kepala keluarga membawa peran tersebut dalam ranah pertemuan desa sampai tingkat provinsi bahkan negara. Padahal secara rasional, perempuan juga memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat sesuai dengan permasalahan mereka.
- b. Sulitnya akses informasi yang bisa diperoleh perempuan. Laki-laki yang lebih banyak berkomunikasi dengan dunia luar. Sumber informasi yang paling digemari adalah TV, namun tontonan sinetron

yang paling banyak dikonsumsi. Sementara informasi penyuluhan/rapat desa cenderung dihadiri oleh laki-laki.

- c. Minimnya pengetahuan mengenai berbagai isu pembangunan dan lingkungan. Meskipun pemberantasan buta huruf dan pendidikan sudah dipahami sebagai kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Namun substansial dari kualitas pendidikan tersebut yang masih minim. Muatan lokal mengenai Pendidikan Lingkungan Hidup di sekolah-sekolah belum dikembangkan, terlebih perempuan didesa/daerah cenderung menikah lebih cepat dari laki-laki (lulus SLTP atau SMU) sehingga akses untuk berkembang menjadi minim.
- d. Perempuan selalu rentan menjadi korban dalam kegiatan pembangunan. Kebanyakan perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai keputusan publik, baik di level formal maupun informal. Padahal dalam banyak kasus perempuanlah yang paling banyak menjadi korban dari keputusan-keputusan itu. Beberapa kasus terjadi bahwa banyak keputusan di kampung, misalnya keputusan menerima atau menolak masuknya suatu perusahaan, yang diputuskan kaum lelaki tanpa melibatkan perempuan. Padahal akses perempuan terhadap sekeliling lebih besar seperti penggunaan air bersih, kesehatan anak dan reproduksi, berladang, serta kesempatan kerja yang minim karena pekerjaan yang didirikan rata-rata diperuntukkan untuk laki-laki. Selain itu kebanyakan pelatihan dan kesempatan kerja dirancang untuk laki-laki. Alokasi pangan, tanah, alat, pekerjaan dan



dokumen identitas hukum selalu ditujukan untuk laki-laki (suami) (Mosse:2007).

Pembangunan yang terjadi selama ini kurang berperspektif pada perempuan. Padahal perempuanlah sebagai pengguna hasil pembangunan terbanyak dan juga terkena dampaknya. Perempuan lebih sering dianggap sebagai objek daripada subjek pembangunan. Padahal, pembangunan yang dilakukan di seluruh bidang, akan selalu berdampak pada perempuan. Misalnya di bidang ekonomi, pembangunan pabrik-pabrik, akan menyerap banyak tenaga kerja perempuan, apalagi ketika terjadi krisis ekonomi, yang mendorong perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun, fasilitas, keamanan dan kebijakan yang berlaku pada pabrik, banyak yang sama sekali tidak mengkomodir kepentingan perempuan.

Kemudian lagi, Akomodasi kebutuhan riil perempuan juga sering dipahami hanya sebatas kebutuhan rumah tangga/keluarga, kesehatan termasuk gizi, pendidikan dan ekonomi. Akibatnya banyak institusi perempuan seperti PKK, Dharmawanita, Program P2WKSS yang dimaksudkan untuk memberdayakan perempuan justru menimbulkan persoalan baru bagi perempuan yaitu beban ganda perempuan (Mafruhah, 2009 : 73).

Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program-program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab terpinggirkannya perempuan. Misalnya, Program Swasembada Pangan atau Revolusi Hijau (*green revolution*) secara ekonomis telah menyingkirkan perempuan dari pekerjaannya sehingga

memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program rev memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan dengan sistim tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi *panenan* dengan *anai-anai*, padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi, yakni semakin miskin karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen. Inilah salah satu contoh bahwa pembangunan selama ini dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender (Fakih, 1987 : 15).

## 2.2. Perempuan Dalam Perspektif Minangkabau

Dalam kebudayaan Minangkabau sejak lama yang kemudian berkembang menjadi “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah” menempatkan perempuan sebagai ‘orang rumah’ dan ‘pemimpin’ masyarakatnya dengan sebutan “bundo kandung”, menyiratkan kokohnya kedudukan perempuan Minangkabau pada posisi sentral. Dalam budaya Minangka perempuanlah pemilik seluruh kekayaan, rumah, anak, suku bahkan kaumnya Purnawati *dalam* (<http://palantaminang.wordpress.com>).

Figur perempuan dalam kekerabatan sebagai *limpapeh* rumah nan gadang, *umbun puro* pegangan kunci, *pusek jalo kumpalan tali*, *kaunduang-unduang ka Madinah kapayuang panji ka sarugo*, memperkuat perempuan Minangkabau menjadi perempuan yang aktif, penuh inisiatif dan menjadi teladan dalam kampung. Artinya secara sosial dan budaya terlindungi oleh sistem matrilinealnya. Secara sosial mereka terlindungi oleh sistem kekerabatan matrilinealnya. Secara budaya mempunyai posisi



yang tinggi dan terhormat dalam keluarga, dan secara ekonomi memperoleh hak atas rumah, sawah ladang serta sumber-sumber ekonomi lainnya. Selain itu perempuan Minangkabau juga diakui mempunyai hak politik. Karena perempuan diakui mempunyai kedudukan sebagai nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banasa, kok mati tampek baniek. Hal di atas adalah gambaran ideal posisi dan kondisi perempuan Minangkabau (Suluah, 2004 : 63).

Namun saat ini semua itu untuk sebagian besar perempuan hanya tinggal menjadi riwayat dulu. Perubahan sosial yang terjadi secara perlahan telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Lunturnya nilai adat dan budaya, semakin renggangnya hubungan kekerabatan, sumber-sumber ekonomi seperti sawah ladang yang semakin sedikit, kecenderungan kepada keluarga inti, model pembangunan paternalistic dan masih banyak faktor lain yang menyebabkan perempuan posisinya, baik secara sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal ini perlu disadari karena masyarakat cenderung terbuai dengan posisi imajinatif perempuan yang tinggi dan terhormat karena sistem matrilinealnya (Suluah, 2004 : 64)..

Bertambahnya jumlah anggota keluarga yang tidak lagi berimbang dengan luas tanah dan rumah yang dimiliki menyebabkan perempuan dewasa ini setelah menikah meninggalkan rumah gadang dan membentuk keluarga inti. Selain itu fenomena jual beli tanah ulayat oleh mamak kepala waris menambah berkurangnya fungsi ekonomi tanah (sawah, ladang) sebagai modal perempuan Minangkabau, cenderung memiskinkan perempuan dan memaksa mereka mencari sumber-sumber



ekonomi alternatif untuk kelangsungan hidupnya Purnawati *dalam* (<http://palantaminang.wordpress.com>).

Peran politik perempuan Minangkabau saat ini juga masih relatif jauh dari apa yang diamanatkan di dalam adat, yaitu bahwa perempuan adalah pemimpin yang cerdik pandai. Di dalam keluarga masih relatif banyak perempuan Minangkabau yang belum berperan secara politis, apakah sebagai tempat bertanya, pemberi solusi, pengambil keputusan dan lain-lain. Secara lebih khusus peran politik perempuan Minangkabau dalam pemerintahan masih relatif rendah. Kedudukan perempuan yang kuat secara politis sebagai pengambil keputusan tidak relevan dengan kenyataan dalam kehidupan politik di nagari saat ini. Sejauh ini perempuan lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial di nagari. Sementara dalam musyawarah dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan lainnya seperti tanah ulayat, pembangunan, sering kali diputuskan dalam rapat adat yang hanya diikuti oleh laki-laki Purnawati *dalam* (<http://palantaminang.wordpress.com>).

Realitas lain yang juga dikemukakan di nagari saat ini adalah bahwa keanggotaan BPRN sebagai lembaga legislatif di nagari yang terdiri dari lima unsur : (1) Alim Ulama, (2) Ninik Mamak, (3) Cadiak Pandai, (4) Bundo Kanduang, (5) Pemuda. Padahal sesungguhnya perempuan juga dapat mewakili unsur-unsur lainnya, seperti unsur alim ulama, cadiak pandai dan unsur pemuda. Hampir seluruh modal sosial, budaya dan modal ekonominya relatif tidak lagi memberi manfaat bagi keberlangsungan kehidupan dan kualitas peran perempuan Minangkabau



menghadapi berbagai persoalan yang khas karena sistem matrilinealnya Purnawati dalam (<http://palantaminang.wordpress.com>).

### 2.3. Konsep Gender

Untuk dapat memahami tentang pengarusutamaan gender dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP), khususnya mengenai keterlibatan perempuan, terlebih dahulu perlu dibahas tentang konsep gender. Begitu banyak ahli yang mengemukakan konsep tentang gender. Menurut Fakih (1996:7) untuk memahami konsep gender terlebih dahulu harus membedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*)

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya. Bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat daftar berikut : laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan

ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat* (Fakih, 1996 : 9).

Sedangkan konsep gender, merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap : kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sejarah perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara (Fakih, 1996 :9 )

Gender berasal dari kata “gender” (bahasa inggris) yang diartikan sebagai jenis kelamin. Namun jenis kelamin di sini bukan seks secara biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis. Pada prinsipnya konsep gender memfokuskan perbedaan peranan antara pria dengan wanita, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati. Oleh karena itu, pembagian peranan antara pria dengan wanita dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan lingkungan. Peran gender juga dapat berubah dari masa ke masa, karena pengaruh kemajuan : pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Hal itu berarti, peran gender dapat ditukarkan antara pria dengan wanita (Aryani : 2002).



Gender juga diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Gender berbeda dengan sek atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis (Moore, 1988, 1994 : 10).

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik sebagai alat reproduksi. Oleh karena itu, seks merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan sehingga bersifat permanen dan universal (Sasongko, 2009). Perbedaan gender dan seks dapat di lihat pada tabel 2.1.:

**Tabel 2.1.**  
**Perbedaan Gender dan Seks**

Gender	Seks
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa berubah</li> <li>2. Dapat dipertukarkan</li> <li>3. Tergantung musim</li> <li>4. Tergantung budaya masingmasing</li> <li>5. Bukan kodrat (buatan masyarakat)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak bisa berubah</li> <li>2. Tidak dapat dipertukarkan</li> <li>3. Berlaku sepanjang masa</li> <li>4. Berlaku di mana saja</li> <li>5. Kodrat (ciptaan Tuhan):perempuan menstruasi,hamil, melahirkan, menyusui</li> </ol>

*Sumber : Sasongko : 2009*

Konsep gender lainnya juga dikemukakan oleh Hatmadji (2004), bahwa gender berasal dari bahasa latin yang berarti tipe atau jenis. Gender didefinisikan sebagai perbedaan peluang, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sejarah pembedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang cukup panjang yaitu melalui proses penguatan dari struktur



sosial, kultur, bahkan negara. Dari proses yang panjang ini gender lambat laun seolah-olah telah menjadi ketentuan dari Tuhan (kodrat atau ketentuan biologis) yang tidak bisa diubah lagi, sehingga mempengaruhi keyakinan pada masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki berpikir dan bersikap sesuai dengan ketentuan sosial, dimana keyakinan pembagian ini terus diwariskan dari generasi ke generasi secara rapi dan terstruktur, lama-kelamaan pembagian ini dianggap alami dan normal (kodrat) sehingga bagi yang melanggar akan dianggap tidak normal atau telah melanggar kodrat dari Tuhan, misalnya sifat lemah lembut, memelihara dan emosional yang dimiliki kaum perempuan merupakan kodrat kaum perempuan (Budiman, 1985 : 2 ).

Dari proses tersebut ternyata telah menciptakan suatu hubungan yang tidak adil antara laki laki dan perempuan, yang menurut Bainar (1998:27) bentuk manifestasi ketidak adilan gender ini adalah dalam : mempersepsi (memberikan pendapat), memberi nilai serta dalam pembagian tugas, semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih cenderung memilih konsep gender yang dimukakan Hatmadji (2004) yang mengemukakan bahwa gender merupakan perbedaan peluang, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 1996:7).



#### 2.4. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Secara operasional, pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pengarusutamaan gender, bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender (tim pusat studi wanita universitas udayana, 2003).

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis, untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) (Juliantara dan Widiawati 2005 : 35). Konsep kesetaraan gender pada prinsipnya memposisikan perempuan dan laki-laki setara dalam kesempatan dan hak-haknya. kesetaraan gender perlu dipahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama; berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya sebagai hak-hak dasarnya, sehingga perempuan dapat menyumbangkan potensinya secara optimal terhadap pembangunan dan menikmati hasil pembangunan Ambarsari Dwi (dalam Mafruhah, 2009:78).

Pengarusutamaan gender (PUG) juga dapat diartikan sebagai suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (BKKBN, 2007).



Pangarusutaan gender ditegaskan dalam *Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000* tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan dalam program pembangunan.

Dengan adanya pengrusutamaan gender, pemerintah dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada seluruh lapisan masyarakat, baik pria maupun wanita. Dengan strategi itu juga, program pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih sensitif atau responsif gender. Hal ini pada gilirannya akan mampu menegakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban laki-laki dan perempuan atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat (tim pusat studi wanita universitas udayana, 2003).

Pengarusutamaan gender barulah akan memberikan hasil secara lebih memuaskan, jika dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari yang tergabung dalam lembaga pemerintah, swasta seperti organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi keagamaan dan lain-lain sampai pada unit yang terkecil yaitu keluarga. Dalam pembangunan di bidang kesehatan misalnya, kalau perencanaannya, pelaksanaannya atau pelayanannya, pemantauannya dan evaluasinya sudah berwawasan gender, maka dapat dipastikan bahwa kesehatan yang baik dapat dinikmati oleh baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga pembangunan di bidang-bidang yang lainnya (tim pusat studi wanita universitas udayana, 2003).



Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi empat hal, yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi. Dalam pelaksanaannya, masing-masing hal itu harus mempertimbangkan empat aspek, yaitu peran, akses, manfaat dan kontrol. Artinya, apakah dalam keempat hal tersebut sudah mempertimbangkan bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah setara dan adil. Apakah akses yang diterima oleh laki-laki dan perempuan juga akan setara dan adil. Apakah manfaat yang langsung dirasakan oleh laki-laki dan perempuan sudah setara dan adil. Akhirnya, apakah pria dan wanita mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan kontrol dan pengambilan keputusan.

Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dalam mensosialisasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penerapannya di Indonesia mengenal prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pluralistis, yaitu menerima keragaman budaya, agama dan adat istiadat (pluralistis), karena bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan adat istiadat tadi merupakan kekayaan dan keragaman yang perlu dipertahankan di dalam Pengarusutamaan Gender tanpa harus mempertentangkan keragaman tersebut.
2. Bukan pendekatan konflik, yaitu pendekatan dalam rangka PUG tidak melalui pendekatan dikotomis yang selalu mempertimbangkan antara kepentingan laki-laki dan perempuan.
3. Melalui proses sosialisasi dan advokasi. Prinsip yang penting dalam PUG di Indonesia adalah melalui perjuangan dan penerapan secara bertahap melalui proses sosialisasi dan advokasi. Dalam PUG tidak semudah membalikkan

telapak tangan atau ibarat memakan "cabe" begitu digigit terasa pedas. Tetapi pelaksanaannya harus dengan penuh pertimbangan melalui proses sosialisasi dan advokasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

4. Menjunjung Nilai HAM dan Demokratisasi, yaitu pendekatan PUG di Indonesia tidak melalui pertentangan-pertentangan dan penekanan-penekanan, sehingga ada kelompok-kelompok yang merasa dirugikan. PUG di Indonesia penerapannya akan selalu menjunjung nilai-nilai Hak Azasi Manusia dan demokratis, sehingga akan diterima oleh lapisan masyarakat tanpa ada penekanan-penekanan (Diklat Teknis Penyadaran Gender, 2008).

Dalam penelitian ini, pengarusutamaan gender dilihat sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan dengan pemihakan kepada perempuan khususnya dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Karena selama ini perempuan mengalami kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dalam pembangunan dan upaya penanggulangan kemiskinan. Pengarusutamaan gender dilihat dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

## **2.5. Ketidakadilan Gender**

Faqih (1996 : 13 ) menyatakan, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, subordinasi, stereotipe/pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif), kekerasan terhadap perempuan, beban



kerja lebih banyak dan panjang. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki (Aryani : 2002).

## **2.6. Ukuran-Ukuran Ketidakadilan Gender**

Menurut Fakih (1996: 13), perbedaan gender sebenarnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan (gender inequalities). Ia menjelaskan bahwa ukuran-ukuran ketidakadilan gender terdiri dari :

### **1. *Marginalisasi.***

Marginalisasi diartikan sebagai suatu proses peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan. Hal ini banyak terjadi dalam masyarakat di Negara berkembang seperti pengusuran dari kampung halaman, eksploitasi. Namun pemiskinan atas perempuan maupun laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender.

Adanya marginalisasi terhadap perempuan memuat perempuan selalu diabaikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena anggapan bahwa tugasnya adalah di rumah dan tidak akan mampu memikirkan jalan keluar untuk kemiskinan.

## 2. Subordinasi

Subordinasi dapat diartikan sebagai suatu keyakinan yang beranggapan bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.

Adanya Subordinasi (penomorduaan) Subordinasi terhadap perempuan membuat perempuan tidak memiliki peluang untuk mengambil keputusan bahkan yang menyangkut dirinya. Perempuan diharuskan tunduk pada keputusan yang diambil oleh laki-laki. Penempatan perempuan di rumah dan memberikan kesempatan lebih pada laki-laki untuk sekolah adalah bentuk subordinasi. Di banyak masyarakat perempuan dianggap terlalu lemah untuk memimpin satu kelompok masyarakat, atau memerintah suatu negara.

## 3. Pandangan Stereotipe.

Stereotipe merupakan citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, (perempuan). Hal



ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara. Apabila seorang laki-laki marah, ia dianggap tegas, tetapi bila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, namun standar nilai tersebut banyak menghakimi dan merugikan perempuan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat termasuk dalam kegiatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.

## **2.7. Budaya Patriarki Berpengaruh Terhadap Pelibatan Laki-Laki dan Perempuan**

Menurut Murniati (2004 : 81) patriarki dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki (ayah), dalam sistem ini laki-laki yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu. Sebagaimana kita ketahui bersama di dunia barat ataupun di timur, perkembangan peradaban manusia tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarki. Di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, budaya patriarki tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan gender. Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia dibentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bagi masyarakat tradisional, patriarki dipandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan adikodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut, ditambah lagi faktor agama telah digunakan untuk memperkuat kedudukan kaum laki-laki. Ihromi (1995:73) juga mengungkapkan bahwa determinis biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun diciptakan berbeda.

Struktur budaya patriarki telah melahirkan keterbatasan perempuan dalam segala hal termasuk dalam hal pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Dalam keluarga, pengambilan keputusan didominasi oleh kaum laki-laki demikian juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Secara tidak langsung budaya patriarki juga telah mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pembangunan selama ini yang dapat dilihat dari :

1. Akses: Budaya patriarki telah membedakan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki sebagai sumber daya pembangunan. Dimana dalam pembangunan selama ini laki-laki lebih cenderung memiliki kesempatan/akses yang lebih besar.
2. Partisipasi: Budaya patriarki telah membedakan peluang untuk berpartisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam pembangunan cenderung didominasi oleh laki-laki



3. Kontrol: Berkembangnya budaya patriarki di tengah masyarakat membuat perempuan dan laki-laki belum mempunyai kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan.
4. Manfaat: Akibat berbedanya akses, partisipasi dan kontrol antara laki-laki dan perempuan, akhirnya laki-laki dan perempuan belum merasakan manfaat yang sama dalam pembangunan (Diklat Teknis Penyadaran Gender, 2008).

## 2.8. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sudah mendunia, bahkan Amerika Serikat yang terkenal dengan negara yang kuat dalam bidang ekonomi ternyata juga mengalami permasalahan kemiskinan (Sherraden, 2006 : 13). Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Sehingga kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional, meliputi dimensi fisik, ekonomi, kebudayaan dan sosial.

Menurut Chambers (1987), kemiskinan adalah suatu keadaan yang melarat dan ketidakberuntungan, suatu sistem minus (*deprivation*), hal ini berkaitan dengan minimnya pendapatan dan tidak memiliki harta, kelemahan fisik, terisolasi, kerapuhan, serta ketidakberdayaan dalam mencukupi hidup yang layak. Sedangkan menurut Nasikun (1995), kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan, yaitu :

”Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifare, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan

seringkali juga berarti akses yang sangat rendah terhadap berbagai ragam sumber daya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan yang dasar tersebut, antara lain : informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”.

Selanjutnya menurut Suharto (2005 : 17), kemiskinan terbagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut, yaitu keadaan kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain.
2. Kemiskinan Relatif, yaitu keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat.
3. Kemiskinan Kultural, yaitu yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern).
4. Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik maupun sosial

Dengan demikian, kemiskinan merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap



pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

## 2.9. Landasan Teori

Paradigma definisi sosial menyatakan bahwa pemikiran individu dalam masyarakat mempengaruhi struktur yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini sekalipun struktur juga berpengaruh terhadap pemikiran individu, akan tetapi yang berperan tetap individu dan pemikirannya Weber *dalam* (Ritzer,2002: 38). Ada tiga varian teori yang tergabung dalam paradigma definisi sosial antara lain :

1. Teori Aksi
2. Teori Interaksionisme Simbolik
3. Teori Fenomenologi

Penelitian ini akan menggunakan teori interaksionisme simbolik, menurut George Herbert Mead teori interaksionisme simbolik melihat kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Mead berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang paling rasional dan memiliki kesadaran akan dirinya. Tindakan seseorang dalam proses interaksi itu bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungan atau dari luar dirinya. Tetapi tindakan itu merupakan hasil dari proses interpretasi, dalam arti memahami simbol-simbol dan saling menyesuaikan makna dari simbol-simbol tersebut. Meskipun norma-norma, nilai-nilai sosial dan makna dari simbol itu memberikan pembatasan terhadap tindakannya, namun dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya manusia

mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan tujuan yang hendak dicapainya (Johnson, 1981: 11).

Dengan teori interaksionisme simbolik, dapat dijelaskan bagaimana perempuan dilibatkan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yaitu dilihat dari sudut pemaknaan individu, tindakan individu (si pengelola dan pelaku program) terhadap laki-laki dan perempuan berdasarkan interpretasinya terhadap simbol-simbol yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tersebut. Dalam proses interaksi dan komunikasi yang ia lakukan antar individu atau antar kelompok selama ini dengan menggunakan makna dari simbol-simbol yang melekat terhadap laki-laki dan perempuan memang dibatasi oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Namun dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya, serta dari pemahamannya terhadap makna dari simbol yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang selalu ia sempurnakan dalam proses interaksi, membuat ia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan menentukan bagaimana perempuan dilibatkan dalam PNPM-MP, serta kegiatan-kegiatan apa saja yang memerlukan pelibatan perempuan.

Dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik, juga dapat dijelaskan faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Salah satu faktor yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah faktor budaya patriarki.

Menurut Spradley (1997:7), kebudayaan bisa dijelaskan dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik, karena konsep kebudayaan sebagai suatu sistem simbol yang mempunyai makna, mempunyai banyak persamaan dengan



interaksionisme simbolik yaitu teori yang berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan makna.

Dengan mengacu pada teori interaksionisme yang dikembangkan oleh Blumer terdapat tiga premis yang bisa menjelaskan bagaimana budaya patriarki mempengaruhi pelibatan perempuan dalam PNPM-MP. Pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Jadi seseorang itu tidak bertindak terhadap berbagai hal, tetapi tindakannya berdasarkan makna yang terkandung dalam berbagai hal tersebut.. Penjelasan yang bisa diperoleh dari gagasan ini terhadap penelitian adalah bahwa pelibatan perempuan dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan suatu tindakan sosial. Artinya si pengelola mempunyai interpretasi terhadap laki-laki dan perempuan. Interpretasi itu bersumber dari budaya patriarki.

Kedua, makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain, terutama dengan orang yang dianggap "cukup berarti". Sebagaimana yang dikatakan (Blumer dalam Poloma, 2003 : 258) "bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu". Dengan gagasan ini dapat dilihat bahwa budaya patriarki, sebagai suatu sistem makna yang dimiliki bersama, dipelajari, diperbaiki, dipertahankan, didefinisikan, serta diinterpretasikan dalam konteks orang yang berinteraksi. Interpretasi si pengelola program terhadap laki-laki dan perempuan yang bersumber dari budaya patriarki diperoleh melalui interaksinya selama ini, baik dengan sesama pengelola program maupun dengan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Ketiga, makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung. Jadi makna-makna tersebut dipilih, diperiksa, dipikirkan, dikelompokkan dan di transformirkan sesuai dengan situasi dimana dia ditempatkan dan arah tindakan. Makna-makna yang telah disempurnakan tersebut dijadikan sebagai instrumen bagi pengarah dan pembentukan tindakan. Gagasan ini dapat menjelaskan bahwa makna laki-laki dan perempuan yang terkandung dalam budaya patriarki tidak serta merta mengendalikan tindakan si pengelola program. Tindakannya dilandaskan atas kesadaran dan interpretasinya sendiri terhadap makna laki-laki dan perempuan yang terkandung dalam budaya. Interpretasi tersebut ia peroleh dari hasil interaksi baik dengan sesama pengelola program maupun dengan masyarakat. Makna-makna tersebut selalu ia sempurnakan tergantung pada situasi masyarakat yang tengah ia hadapi. Jadi bisa saja pada pada situasi masyarakat yang berbeda si pengelola program menginterpretasikan budaya patriarki dengan pemahaman yang agak berbeda, sehingga pada situasi tertentu memungkinkan perempuan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Tahapan Perencanaan PNPM-MP dan faktor apa yang mempengaruhi keterlibatan perempuan Pada Tahapan Perencanaan PNPM, penelitian ini dikhususkan pada Musyawarah Campuran (laki-laki dan perempuan) PNPM-MP. Informasi yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bagaimana interpretasi, pemikiran, pemaknaan si pelaku terhadap makna yang terkandung dalam simbol-simbol terhadap laki-laki dan perempuan yang bersumber dari budaya patriarki. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sesuai dengan pendapat Afrizal (2008 : 14) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu social yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.

Lebih lanjut Ambert dalam Soetrisno (2001:65) mengatakan “*Qualitative research seeks rather than breadth. Instead of drawing from large, representative sample of and entire population of interest, qualitative research seeks to acquire indepth and intimate information about a smaller group of persons*”. Maksudnya adalah penelitian kualitatif berusaha untuk mencari dan memperoleh informasi mendalam daripada informasi yang luas atau informasi yang banyak.

Berdasarkan taraf penjelasannya, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang lebih mendalam (*thick description*) yang

mencoba menggambarkan secara mendalam suatu obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Selanjutnya, agar hasil penelitian ini mempunyai bobot yang tinggi, maka penelitian ini akan dilakukan dengan jalan mengidentifikasi dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh dan relevan untuk diperhatikan (Soetrisno, 2001 : 67).

### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Ada dua alasan pemilihan lokasi ini, pertama karena jumlah penduduk perempuan di Nagari ini sangat banyak jika dibandingkan jumlah penduduk perempuan di nagari lainnya di Kecamatan Lintau Buo Utara, yaitu sebanyak 4082 orang. Kedua, karena PNPM Mandiri Perdesan di Nagari ini sudah berjalan  $\pm$  2 tahun, yaitu dimulai dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Dalam pelaksanaannya pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Lintau Buo Utara telah dua kali mendapatkan penghargaan. Pada tahun 2008, Kecamatan Lintau Buo Utara mendapatkan penghargaan sebagai UPK terbaik dari Mendagri, kemudian pada tahun 2009 pada tingkat provinsi pelaksanaan PNPM-MP di kecamatan ini juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur.

### 3.3. Teknik Pemilihan Informan

Informan menurut Morse (dalam Bungin, 2001:91) yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* atau bertujuan. Teknik *purposive* juga biasa diartikan sebagai teknik pengambilan informan secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling*



dengan alasan karena informan yang ada hanyalah orang-orang yang bertugas sebagai pengelola program.

Untuk menggali data yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dalam upaya penanggulangan kemiskinan khususnya dalam PNPM-MP, maka peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan adalah pengelola dan pelaku-pelaku PNPM-MP yang terdiri dari, Camat Kecamatan Lintau Buo Utara, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJoK) PNPM-MP, Tim Fasilitator PNPM-MP, Wali Nagari Batu Bulek, 1 orang anggota masyarakat yang menjabat sebagai Ketua UPK (Unit Pengelola dan Operasional Pelaksanaan Kegiatan), 1 orang anggota masyarakat sebagai Sekerretaris UPK, 1 orang anggota masyarakat yang menjabat sebagai PL (Pendamping Lokal) 2 orang anggota masyarakat yang menjabat sebagai TPK PNPM-MP (Tim Pengelola Kegiatan), 2 orang anggota masyarakat yang menjabat sebagai TPU PNPM-MP (Tim Penulis Usulan), 2 orang yang menjabat sebagai KPMN PNPM-MP serta 5 orang (laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga) yang tidak menjabat apapun dalam organisasi PNPM-MP Nagari Batu Bulek. Untuk lebih jelasny dapat dilihat pada tabel 3.1. :

**Tabel 3.1. Informan Penelitian**

No	Nama/Pendidikan/Usia/JK	Kedudukan
1.	SH/S1/49 th/LK	Camat Kecamatan Lintau Buo Utara
2.	IY/S1/52 th/LK	Wali Nagari Batu Bulek
3.	SE/SMA/45 th/LK	Fasilitator
4.	ID/S1/33 th/LK	Pjok PNPM-MP Kec. Lintau Buo Utara
3.	DE/SMA/37 th/LK	Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MP
4.	HB/S1/25 th/LK	Sekretaris UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MP
5.	UJ/SMA/46 th/LK	TPK (Tim Pengelola Kegiatan)/Masyarakat Non Miskin
7	MY/SMA/45 th/LK	Pendamping Lokal/Masyarakat Non Miskin
6.	LN/SMA/36 th/PR	TPK (Tim Pengelola Kegiatan)/IRT/Masyarakat Miskin
7.	UP/SLTP/35 th/PR	TPU (Tim Penulis Usulan)/IRT/Masyarakat Miskin
8.	UD/SLTP/46 th/KL	TPU (Tim Penulis Usulan)/Masyarakat Miskin
9.	UK/SMA/48 th/LK	KPMN,Masyarakat Non Miskin
10.	MZ/S1/44 th/PR NN/S1/35 th/PR	KPMN/IRT/Bundo Kanduang/Guru/Masyarakat Non Miskin
11.	MR/SLTP/29 th/PR	Pelaku PNPM-MP/IRT/Guru/Masyarakat Non Miskin
12.	HL/SMA/21th/PR	Pelaku PNPM-MP/Pemudi/Masyarakat Miskin
14.	UA/SLTP/41 th/PR	Pelaku PNPM-MP/IRT/Masyarakat Miskin
15.	EE/SLTP/37 th/PR	Pelaku PNPM-MP/IRT/Masyarakat Miskin
	IM/SLTP/41 th/PR	Pelaku PNPM-MP/IRT/Masyarakat Miskin
16.	AP/SMA/51 th/LK	Pelaku PNPM-MP/Niniak Mamak Nagari Batu Bulek
17.		/Masyarakat Non Miskin
18.	DR/SMA/42 th/LK	Pelaku PNPM-MP/Masyarakat Miskin
19.	NL/SMA/43 th/LK	Pelaku PNPM-MP/Masyarakat Miskin
20.	AA/SMA/46 th/LK	Pelaku PNPM-MP/Niniak Mamak/Masyarakat Non Miskin



Pemilihan informan ini adalah dalam rangka keakuratan data agar manusia, latar, kejadian, diupayakan untuk dapat terwakili agar dapat memberikan informasi penting mengenai obyek yang diteliti (Alwasilah, 2002:146).

### **3.4. Unit Analisis**

Dalam penelitian unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau penentuan criteria objek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian mengenai Pengarusutaaan Gender Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang menjadi unit analisis adalah individu yaitu pengelola dan pelaku-pelaku PNPM-MP

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena hakikat dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya diinterpretasikan dan dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang berasal dari nara sumber atau informan yang diteliti berupa kata-kata maupun tindakan. Sedangkan data sekunder adalah data yang berbentuk dokumen atau catatan-catatan dari institusi yang bersangkutan.

Demi mencapai kelengkapan mengenai permasalahan penelitian, peneliti menggunakan 2 teknik yaitu :

## 1. Wawancara Tidak Berstruktur Atau Wawancara Mendalam.

Dengan menggunakan teknik ini, seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternative jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan hanya mempunyai pertanyaan yang umum, yang kemudian diditeltkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya (Afrizal, 2008 : 24)

## 2. Pengumpulan Dokumen

Para peneliti mengumpulkan bahan-bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk mencek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan menggunakan wawancara mendalam (Afrizal, 2008 : 24)

Menurut Koentjaraningrat (1983 : 129), dokumen adalah bahan klasik untuk meneliti perkembangan historis yang khusus. Biasanya digunakan untuk menjawab persoalan tentang apa, kapan dan di mana

Teknik-teknik di atas akan digunakan untuk pengambilan data seperti yang disajikan dalam tabel 3.2.



**Tabel 3.2. Data Yang Akan Diambil dan Metode Yang Dipakai**

Jenis Data	Sumber Informasi	Data Yang Diambil	Metode
Primer	Pengelola & Pelaku-Pelaku PNPM-MP	Peneliti ingin mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada Tahapan Perencanaan PNPM-MP, bagaimana implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam tahapan perencanaan	Wawancara
Sekunder	Studi keputusan  Kantor Camat Lintau Buo Utara	Buku-buku yang berhubungan dengan gender, dan program penanggulangan kemiskinan Panduan Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP Data tentang bantuan PNPM-MP Di Lintau Buo Utara Data tentang laporan perkembangan PNPM-MP di Kec. Lintau Buo Utara.	Dokumentasi  Dokumentasi

### 3.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Moleong, 2001:103).

Analisis data dilakukan sejak kegiatan pengumpulan data sampai penyusunan laporan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Tahap-tahap analisis data menurut Bungin ada tiga tahap yaitu :

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan/*verifikasi* data

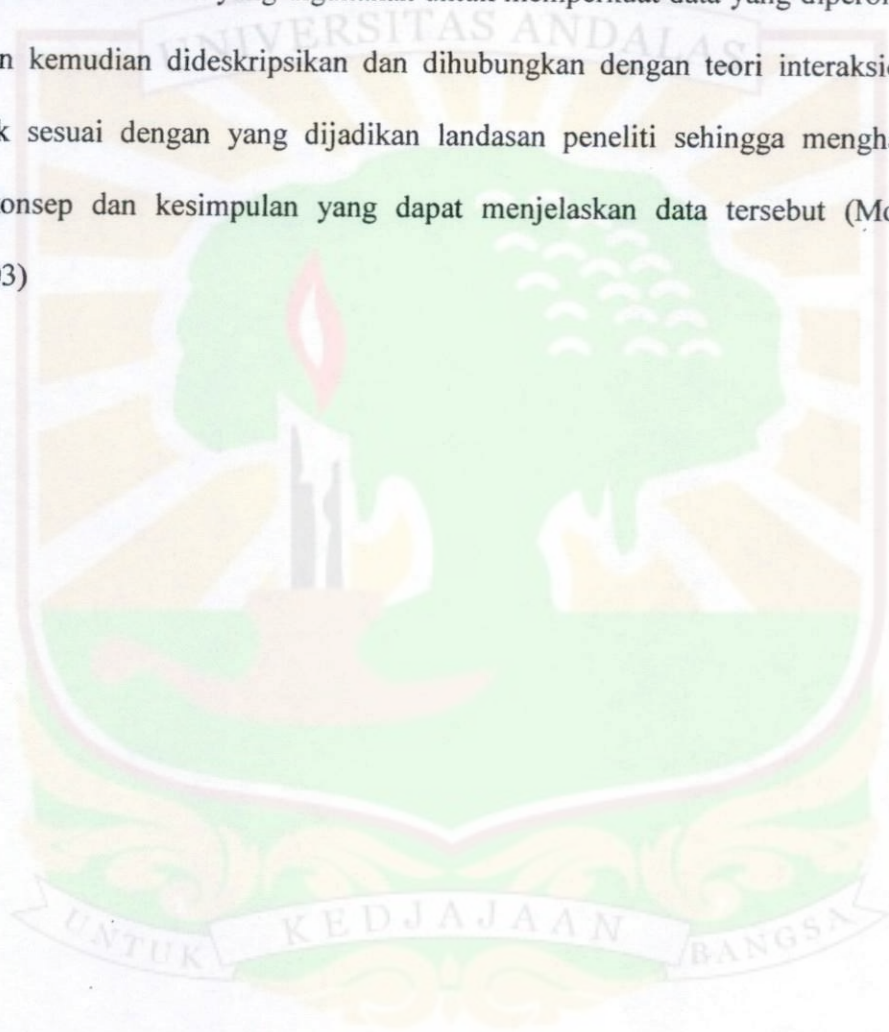
Reduksi data adalah tahap analisis yang meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakkan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Setelah peneliti memperoleh data dari lapangan baik dari hasil wawancara yang dicatat langsung maupun wawancara yang direkam dari aktivis perempuan selanjutnya peneliti melakukan pemindahan data dari rekaman wawancara dipindahkan kedalam bentuk tulisan secara keseluruhan yang dilakukan pada hari itu juga, jadi bila dalam satu hari peneliti dapat melakukan wawancara kepada satu atau dua informan maka hasilnya langsung ditranskripsikan begitupun untuk hari yang berikutnya. Kemudian peneliti mengelompokkan data tersebut atau memberi kode, mengurutkan, juga memfokuskan pada data-data hasil wawancara yang memang benar-benar dibutuhkan, membuang yang tidak perlu sehingga memudahkan peneliti menyusun laporan penelitian.

Setelah mereduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data, karena data yang telah terkumpul belum memberikan gambaran secara keseluruhan tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan, maka peneliti perlu melakukan penyajian data berupa pengelompokan-pengelompokan data yang



dibuat dalam bentuk tabel-tabel dan dipersentasekan sehingga membantu peneliti pada tahap analisis atau penarikan kesimpulan.

Tahap akhir analisis adalah menarik kesimpulan, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, serta dokumentasi seperti, artikel, foto, jadwal kegiatan perempuan dan lain-lain yang digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan kemudian dideskripsikan dan dihubungkan dengan teori interaksionisme simbolik sesuai dengan yang dijadikan landasan peneliti sehingga menghasilkan suatu konsep dan kesimpulan yang dapat menjelaskan data tersebut (Moleong, 2001:103)



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Keadaan Geografis Nagari Batu Bulek

Nagari Batu Bulek merupakan nagari yang terletak di wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 3.510 Ha. Untuk lebih jelasnya gambaran daerah Nagari Batu Bulek dapat dilihat pada gambar 4.1.

**Gambar 4.1. Peta Nagari Batu Bulek**



Dari peta di atas terlihat jelas bahwa Nagari ini terletak di bawah kaki Gunung Sago. Posisi nagari yang terletak di bawah kaki gunung membuat nagari ini memiliki tanah yang subur, dan sangat cocok untuk bertani dan berladang. Nagari Batu Bulek juga dilintasi oleh dua batang air yaitu Batang Kawai dan Batang Tampo.



Dua batang air inilah yang dijadikan oleh masyarakat sebagai sumber irigasi untuk keperluan pertanian.

Secara geografis jarak dari Nagari Batu Bulek ke Ibu Kota Provinsi memang lumayan jauh yaitu 60 km, namun nagari ini sesungguhnya mudah diakses. Kondisi jalan yang beraspal memudahkan transportasi umum untuk melewatinya. Bahkan Nagri Batu Bulek juga menjadi pelintasan transportasi umum yang memuat penumpang menuju Kota Padang dan Batusangkar.

### **Penggunaan Lahan**

Terdapat berbagai macam penggunaan lahan di nagari ini yaitu untuk sawah (sawah irigasi dan sawah tadah hujan), tanah kering yang dijadikan sebagai tegal/ladang, fasilitas umum (lapangan dan perkantoran dll). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

**Tabel 4.1**  
**Penggunaan Lahan Di Nagari Batu Bulek**

<b>Penggunaan lahan</b>	<b>Luas lahan (ha)</b>
1. Tanah Sawah :	
- Sawah Irigasi	280 Ha
- Sawah Tadah Hujan	47 Ha
2. Tanah Kering	
- Tegal/Ladang	663 Ha
3. Fasilitas Umum	
- Lapangan	3 Ha
- Perkantoran Pemerintahan	1 Ha

*Sumber: Profil Nagari Batu Bulek, Juni 2007*

Dari empat penggunaal lahan di Nagari ini, penggunaan lahan yang paling luas adalah sebagai tegal/ladang yaitu 663 Ha. Tegal atau ladang yang terdapat di wilayah Nagari Batu Bulek ini adalah milik penduduk, yang diolah secara turun

menurun. Tanaman yang biasanya ditanam adalah pisang, jeruk, alpokat, nenas, semangka, dan aren. Berdasarkan hasil observasi di lapangan tanaman yang paling banyak ditanam adalah tanaman aren.

#### **4.1.2. Keadaan Demografi Nagari Batu Bulek**

##### **A. Komposisi Penduduk**

Penduduk Nagari Batu Bulek berjumlah 8.123 orang, yang terdiri dari 2.137 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 476/620/bpmkb-2007 di Nagari ini terdapat 574 Rumah Tangga Miskin (RTM). Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari Batu Bulek dan dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa yang tergolong dalam penduduk miskin adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara minimal seperti sandang, pangan dan papan.

##### **1. Komposisi Etnisitas**

Terdapat empat macam etnis di Nagari Batu Bulek yaitu Minangkabau, Jawa, Batak, dan Melayu. Sebagian besar masyarakat Nagari Batu Bulek berasal dari Etnis Minangkabau, hanya ada 19 (sembilan belas) orang dari Etnis Jawa, 5 (lima) orang dari Etnis Melayu, dan 4 (empat) orang dari Etnis Batak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Batu Bulek, penduduk yang berasal dari Etnis Jawa, Batak dan melayu pada awalnya mereka hanya sebagai pendatang yang kemudian menikah dengan orang Nagari Batu Bulek dan diangkat sebagai *Urang Sumando* oleh keluarga perempuan yang menikah dengannya. Walaupun terdapat empat macam etnis di nagari ini, kehidupan masyarakat tetap harmonis dan saling menghargai satu sama lainnya, tidak pernah terjadi konflik antar etnis-etnis yang berbeda tersebut.



## 2. Komposisi Agama

Semua masyarakat Nagari Batu Bulek beragama Islam. Hal ini didukung dengan berdirinya 11 buah Masjid, serta 27 buah Langgar/Surau/Mushalla. Disetiap Jorong di Nagari ini terdapat  $\pm$  1 bangunan Masjid dan  $\pm$  2 bangunan Mushalla. Dengan lengkapnya sarana peribadatan membuat masyarakat nagari ini sangat mudah untuk menjangkau tempat peribadatan untuk melakukan kewajiban mereka sebagai umat muslim, seperti sholat wajib dengan berjama'ah, sholat jum'at, serta sholat taraweh ketika bulan Ramadhan tiba.

## 3. Komposisi Umur

Penduduk Nagari Batu Bulek terdiri dari beragam golongan umur. Dari jumlah keseluruhan penduduk Nagari Batu Bulek, golongan umur terbanyak berada pada golongan umur 34-49 tahun yaitu sebanyak 1800 orang, sedangkan yang paling sedikit berada pada golongan umur 0-12 bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Jorong Kampung Baru Menurut Golongan Umur**

Umur	Jumlah
0-12 Bulan	135 Orang
1-12 Tahun	1412 Orang
12-18 Tahun	828 Orang
18-25 Tahun	916 Orang
25-34 Tahun	1022 Orang
34-49 Tahun	1800 Orang
49-54 Tahun	656 Orang
54-58 Tahun	638 Orang
59 + Tahun	716 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>8.123 Orang</b>

*Sumber: Profil Nagari Batu Bulek, Juni 2007*

Dari tabel di atas bisa dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Nagari Batu Bulek terdiri dari penduduk yang tergolong dewasa. Hal ini tentu sangat mendukung kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perdesaaan (PNPM-MP), karena berdasarkan wawancara dengan Fasilitator PNPM-MP yang dituntut untuk terlibat dalam setiap kegiatan PNPM-MP adalah penduduk yang sudah dewasa.

#### **4. Komposisi Jenis Kelamin**

Lebih dari setengah penduduk Nagari Batu Bulek terdiri dari penduduk perempuan, dimana dari jumlah keseluruhan penduduk nagari ini, terdapat 4.082 jiwa penduduk perempuan dan 4.041 jiwa penduduk laki-laki. Hal ini tentu sangat mendukung pelaksanaan PNPM-MP di nagari ini, karena dalam PNPM-MP keterlibatan perempuan merupakan suatu keharusan. Dengan masuknya PNPM-MP di Nagari Batu Bulek diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam usaha penanggulangan kemiskinan di nagari mereka.

#### **B. Keadaan Pendidikan**

Tingkat Pendidikan Masyarakat di Nagari Batu Bulek sangat beragam mulai dari bertingkat pendidikan SD sampai dengan S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3.3.1. berikut ini :



**Tabel 4.3. Keadaan Pendidikan Masyarakat Nagari Batu Bulek**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Belum Sekolah	935 Orang
Pernah Sekolah SD Tetapi Tidak Tamat	121 Orang
Tamat SD/Sederajat	822 Orang
SLTP/Sederajat	501 Orang
SLTA/Sederajat	3.084 Orang
D-1	126 Orang
D-2	128 Orang
D-3	142 Orang
S1	180 Orang
S2	3 Orang

*Sumber: Profil Nagari Batu Bulek, Juni 2007*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Nagari Batu Bulek bertingkat pendidikan SLTA/Sederajat yaitu sebanyak 3.084 orang. Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat yang paling sedikit berada pada tingkat pendidikan S2, yaitu hanya 2 orang saja. Dari tabel di atas juga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Nagari Batu Bulek cukup bagus. Hal ini tentu juga berpengaruh terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di nagari ini. Dengan banyaknya SDM yang berkualitas akan mempercepat proses pembangunan serta kemajuan di nagari ini, kemudian lagi dengan banyaknya SDM yang berkualitas secara tidak langsung juga akan memperlancar pelaksanaan PNPM-MP.

### **C. Perekonomian Penduduk**

Sebagian besar penduduk Nagari Batu Bulek bermatapencaharian sebagai petani. Sebagiannya lagi ada yang bermatapencaharian sebagai pedagang, pengarajin, pegawai negeri, peternak, montir dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian**

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.608 Orang
2.	Buruh Tani	187 Orang
3.	Buru/Swasta	420 Orang
4.	Pegawai Negeri	182 Orang
5.	Pengrajin	81 Orang
6.	Pedagang	87 Orang
7.	Peternak	120 Orang
8.	Montir	12 Orang
9.	Pensiunan	98 Orang
10	Pengusaha Industri	20 Orang
	Tukang	96 Orang

*Sumber: Profil Nagari Batu Bulek, Juni 2007*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Nagari Batu Bulek bermatapencarian sebagai petani yaitu sebanyak 1.608 orang. Berdasarkan keterangan Wali Nagari Batu Bulek dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hampir semua KK yang ada di Nagari Batu Bulek memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari dari hasil bertani yaitu yaitu dengan menanam padi, serta tanaman pangan lainnya seperti : jagung, kacang tanah, kacang panjang, ubi kayu, ubi jalar, cabe, mentimun, bawang merah, tomat, kentang, buncis, dan terong.

Dengan masuknya PNPM-MP di Nagari ini, tentu akan membawa angin segar bagi petani-petani di nagari ini, karena dalam PNPM-MP juga menyediakan dana untuk memperlancar kegiatan pertanian, misalnya jika ditemukan permasalahan gagal panen atau sedikitnya hasil pertanian yang disebabkan oleh kurang lancarnya irigasi ke daerah pertanian, maka PNPM-MP akan membantu permasalahan tersebut dengan membuat bendungan atau memperbaiki saluran irigasi yang sudah ada.



#### **D. Kelembagaan**

Nagari Batu Bulek dipimpin oleh seorang wali nagari (kepala nagari) yang secara administrasi berada di bawah Camat Lintau Buo Utara. Wali nagari dibantu oleh 8 orang yaitu Sekretaris Nagari, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Perekonomian, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan, Bendahara Nagari, Petugas Kamtibmas, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran I. Organisasi penduduk yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah dan menginduk Kepada Nagari Batu Bulek terdiri dari :

##### **1. Posyandu**

Biasanya kegiatan Posyandu dilakukan setiap satu bulan sekali yaitu setiap tanggal 11, yang menangani kegiatan posyandu ini adalah para bidan yang didatangkan dari PUSKESMAS. Ada beberapa orang bidan di Nagari Batu Bulek diantaranya Bidan Teti, Bidan Yen dll. Biasanya dalam kegiatan posyandu bidan akan dibantu oleh ibu-ibu Nagari Batu Bulek yang menjadi kader posyandu.

Kegiatan Posyandu ini meliputi kegiatan memeriksa kesehatan ibu hamil dan menyusui, menimbang anak, memberikan vitamin pada anak dan ibu hamil serta memberikan pengarahan kepada ibu-ibu di Nagari Batu Bulek . Kegiatan Posyandu biasanya dilakukan di puskesmas-puskesmas pembantu di Nagari Batu Bulek.

##### **2. Karang Taruna**

Bila ada pertandingan olahraga misalnya pertandingan bola kaki, bulutangkis, bola voli antar jorong/kelurahan/kecamatan maka akan diurus oleh Karang Taruna. Biasanya para pengurus dan anggota Karang Taruna ini sangat sibuk

ketika menjelang hari HUT RI yaitu pada bulan Agustus. Karang Taruna ini sangat bersemangat bila sudah memasuki bulan Agustus. Mereka bersama perangkat desa dan penduduk akan membuat proposal bantuan dana dan akan menyebarkannya bahkan sampai ke Kota Padang..

### **3. Kelompok Tani**

Kelompok tani yang ada di Nagari Batu Bulek bernama diantaranya bernama kelompok Karya Usaha Maju. Kegiatan kelompok ini adalah bila ada salah satu dari anggota kelompok yang memerlukan bantuan untuk menggarap sawah atau merambah/membersihkan semak belukar yang tumbuh di kebun atau di ladang mereka, maka mereka akan bergotong royong untuk membantu anggota kelompok tadi. Bila ada anggota kelompok yang tidak datang untuk membantu, maka orang yang tidak datang tadi harus membayar denda sekitar 20 ribu. Biasanya yang menyediakan minum dan kue-kue untuk mereka yang membantu adalah orang yang meminta bantuan tadi.

### **E. Struktur Kekerabatan Di Nagari Batu Bulek**

Penduduk Nagari Batu Bulek merupakan penduduk asli Minangkabau. Pada penduduk Minangkabau ada yang namanya *paruik*. Paruik adalah persekutuan hukum yang didalam bahasa Indonesia dapat kita samakan dengan keluarga. Struktur keluarga suku Minangkabau sangat berbeda dengan struktur keluarga suku-suku lain di Indonesia. Garis keturunan diperhitungkan menurut garis ibu, yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Kepemimpinan dipegang oleh saudara laki-laki ibu, yang disebut *mamak* (Amir, 1997:22).



Walaupun struktur kekerabatan masyarakat Minangkabau berdasarkan garis ibu (matrilineal), namun yang berkuasa di dalam kesatuan-kesatuan tersebut selalu laki-laki dari garis ibu yaitu mamak, hanya saja kekuasaan selalu didasarkan atas mufakat seperti bunyi pepatah Minang :

*Kamanakan barajo ke mamak  
Mamak barajo Mamufakat (Bachtiar, 1984:231)*

Sosok perempuan di Minangkabau sesungguhnya mendapat penghargaan dan perlindungan dari adat, baik secara moril maupun materiil. Julukan Bundo Kanduang (ibu sejati yang mempunyai sifat keibuan dan kepemimpinan), serta hak warisan yang jatuh kepihak wanita memberikan legitimasi, bahwa adat matrilineal yang dianut suku Minangkabau memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kaum perempuan. Namun sebaliknya, Adat marilineal tidak memberi kesempatan yang luas bagi perempuan Minangkabau untuk terlibat terlalu banyak dalam aktifitas lainnya di luar rumah. Larangan atau resistensi yang sangat kuat terutama datang dari pihak mamak (saudara laki-laki ibu) sebagai pihak yang berkuasa dalam sistem kekerabatan matrilineal.

Penempatan perempuan sebagai pengelola warisan pusaka di Minangkabau merupakan bentuk keterikatan perempuan Minangkabau terhadap perannya yang besar dalam mengelola keluarga, tetapi tidak mempunyai keleluasaan untuk menentukan putusan, kindness dalam mengaktualisasikan diri dan sumbangsih bagi masyarakatnya. Tradisi pingitan membatasi peran perempuan hanya untuk mengurus rumah. Selebihnya, hubungan dengan dunia luar dikekang dengan berbagai macam pantangan dan batasan. (Suluah, 2004:62).

Seiring berjalannya waktu, dan terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat, yang mengacu pada perubahan sosial dan budaya, mengakibatkan terjadinya evolusi pada masyarakat Minangkabau dimana fungsi mamak sudah mulai memudar. Mereka sibuk dengan keluarga mereka masing-masing. Sekarang fungsi mamak sudah mulai beralih ke tangan bapak (suami) (Evers 1995:134).

#### **4.2. Kondirsi Mutakhir Keterlibatan Perempuan Dalam Program Pembangunan Sebelum Masuknya PNPM-MP.**

Sebelum masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), sebelumnya tahun 2007 di Nagari Batu Bulek juga telah dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK). Di dalam program ini masyarakat miskin diharapkan berperan secara aktif dalam setiap tahapan PNPM-PPK, mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Batu Bulek, Bapak IY, walaupun program ini ada membawa perubahan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat Nagari Batu Bulek. Namun keterlibatan masyarakat perempuan dalam kegiatan ini sangat rendah. Menurutnya keterlibatan perempuan dalam PNPM-MP jauh lebih baik dari pada keterlibatan perempuan dalam PNPM-PPK.

Kemudian, karena terlalu banyaknya pertemuan-pertemuan yang dilakukan juga mengakibatkan perempuan tidak mengerti apa isi dari pertemuan tersebut, mereka menyerahkan semuanya pada relawan yang telah ditunjuk yang sebagian besarnya terdiri dari laki-laki. Banyak perempuan yang tidak ingat lagi kegiatan apa saja yang sudah mereka lakukan.



Seperti yang dikemukakan oleh Ibu MR :

*Nde dak takana lai do, apo kegiatan PPK tu pokok e banyak.* Saya tidak ingat lagi apa kegiatan PPK itu karena kegiatannya banyak.

Dari beberapa hasil wawancara di atas, paling tidak di dapat keterangan bahwa keterlibatan perempuan dalam program sebelum masuknya PNPM-MP sangat rendah. Bahkan dikatakan bahwa keterlibatan perempuan di PNPM-MP jauh lebih bagus dari pada keterlibatan perempuan dalam PNPM-PPK. Karenanya, bisa dibayangkan seberapa rendahnya keterlibatan perempuan dalam program tersebut, karena dalam PNPM-MP yang dikatakan bahwa keterlibatan perempuannya jauh lebih baik tersebut, kenyataannya dilapangan menunjukan bahwa keterlibatan perempuan juga masih sangat rendah dan belum maksimal.

#### **4.3. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).**

##### **4.3.1. Konsep PNPM Mandiri Perdesaan**

Dalam Upaya penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan kebijakan program yang lebih memperhatikan permasalahan, kebutuhan, serta aspirasi laki-laki dan perempuan. Melalui proses pembangunan partisipatif yang responsif gender, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (PTO PNPM-MP, 2008).

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya

kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan (PTO PNPM-MP, 2008)

Sedangkan misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan (PTO PNPM-MP, 2008).

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) (PTO PNPM-MP, 2008).

#### **4.3.2. Tujuan Program**

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan



mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan (PTO PNPM-MP, 2008)

#### **4.3.3. Keluaran Program**

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai keluaran program sebagai berikut :

- a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
- b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa

- c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
- d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat
- e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM
- f. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan
- g. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan (PTO PNPM-MP, 2008)

#### 4.3.4. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. ***Bertumpu pada pembangunan manusia.*** Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata



- b. **Otonomi.** Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar
- c. **Desentralisasi.** Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat
- d. **Berorientasi pada masyarakat miskin.** Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin
- e. **Partisipasi.** Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil
- f. **Kesetaraan dan keadilan gender.** Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik
- g. **Demokratis.** Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat

- h. **Transparansi dan Akuntabel.** Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif
- i. **Prioritas.** Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan
- j. **Keberlanjutan.** Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya (PTO PNPM-MP, 2008)

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa dalam setiap kebijakan program mulai dari Tujuan Program, Capaian Program, Prinsip Dasar, serta Ketentuan Dasar PNPM-MP terdapat poin penting mengenai kesetaraan dan keadilan gender.

#### **4.3.5. Kelompok Sasaran:**

Berdasarkan Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan yang menjadi kelompok sasaran program adalah :

1. Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan,
2. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,
3. Kelembagaan pemerintahan lokal (PTO PNPM-MP, 2008)



#### **4.3.6. Pelaku-Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan**

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten (PTO PNPM-MP, 2008).

#### **4.3.7. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan**

Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan.

##### **1. Perencanaan Kegiatan**

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten.

Tahapan kegiatan perencanaan di Nagari terdiri dari :

1. Sosialisasi kepada berbagai elemen komunitas nagari
2. Penggalian Gagasan Nagari
3. Musyawarah Perencanaan
4. Pelaksanaan Penulisan usulan Nagari
5. Verifikasi Usulan

## **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari :

### **1. Persiapan Pelaksanaan :**

- a. Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan*
- b. Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa*

### **2. Pelaksanaan :**

- a. Penyaluran Dana*
- b. Pengadaan Tenaga Kerja*
- c. Pengadaan Bahan dan Alat*



*d. Rapat Evaluasi TPK*

3. Musdes Pertanggungjawaban

4. Sertifikasi

5. Revisi Kegiatan

6. Dokumentasi Kegiatan

7. Penyelesaian Kegiatan :

*a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan*

*b. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)*

*c. Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)*

*d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)*

*e. Pembuatan Dokumen Penyelesaian*

*f. Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (kondisi khusus)*

**3. Pelestarian Kegiatan**

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan (*sustainable*). Disamping manfaat dari hasil kegiatan, maka aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek *good governance*, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus mampu memberikan dampak perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Berdasarkan PTO PNPM Mandiri Perdesaan tahapan Kegiatan Pelestarian terdiri dari :

1. Hasil Kegiatan

2. Proses Pelestarian

3. Komponen Pendukung Pelestarian

#### 4. Sistem Pemeliharaan

#### 5. Pelatihan Pemeliharaan (PTO PNPM-MP, 2008)

Pengarusutamaan gender dalam penelitian ini dilihat pada kegiatan perencanaan PNPM-MP, yaitu melihat bagaimana akses, kesempatan, partisipasi perempuan dalam 12 rangkaian kegiatan yang dilakukan pada Tahapan Perencanaan PNPM-MP khususnya pada musyawarah campuran (laki-laki dan perempuan)

#### **4.4. Pengarusutamaan Gender Dalam PNPM-MP**

Selama ini telah banyak program pembangunan yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Namun program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan cenderung tidak responsif gender. Akibatnya menimbulkan akses, peran, kontrol, serta manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam pemabangunan. Untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan (Arjani, 2002)

Oleh karenanya pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam terminologi pemerintah, pengarusutamaan gender adalah startegi yang dilaksanakan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi dan kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan Sujana *dalam* (<http://www.pnpmmandiri>).



Menurut Pemerintah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan suatu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang dikeluarkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan. Program ini didisain untuk menerapkan konsep pengarusutamaan gender. pengarusutamaan gender dalam PNPM Mandiri Perdesaan diwujudkan dengan memberikan kesempatan, akses, kontrol, partisipasi, serta manfaat yang sama dan adil kepada laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam setiap alur/tahapan kegiatan yang dilakukan PNPM Mandiri perdesaan di daerah mereka masing-masing. Keseriusan PNPM Mandiri perdesaan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender juga ditunjukkan dengan memasukan poin mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap kebijakan program (Tempo, 16 Desember 2009).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (*PjOK*) Kecamatan Lintau Buo Utara, Bapak ID :

“Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan ini lebih memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan baik itu laki-laki maupun perempuan ke dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Karenanya PNPM Mandiri Perdesaan ini menurut saya merupakan salah satu program pembangunan yang lebih memperhatikan masalah kesetaraan dan keadilan gender, hal ini terlihat dengan jelas karena baik di dalam tujuan program, capaian program, dan prinsip dasar program terdapat poin penting mengenai kesetaraan dan keadilan gender. PNPM-MP benar-benar ingin mengajak perempuan untuk lebih terlibat dalam setiap alur/tahapan kegiatannya”.

Seterusnya, Agusni, Asisten Deputi III Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP) juga mengkonfirmasi bahwa PNPM-MP mendorong masyarakat untuk memahami bahwa seharusnya kaum perempuan punya peran dalam membangun masyarakat.

Karenanya, KPP terus berupaya menerapkan pengarusutamaan gender dalam PNPM-MP dengan membina para fasilitator agar dalam menjalankan perannya bisa lebih sensitif gender atau memperhatikan peran serta laki-laki sekaligus perempuan (Tempo, 16 Desember 2009).

Untuk mendukung pernyataan di atas Bapak AS, selaku Fasilitator Pemberdayaan PNPM-MP Nagari Batu Bulek mengemukakan:

Sebagai fasilitator PNPM-MP kami memang dibina untuk lebih memperhatikan serta mengupayakan pengarusutamaan gender dalam setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan.

Fasilitator diberikan pembekalan agar dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan mereka bisa menerapkan konsep pengarusutamaan gender dalam setiap tahapan yang akan dilakukan dalam PNPM-MP. Pembekalan kepada fasilitator tersebut meliputi:

1. Pengetahuan tentang gender;
2. Pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Kemampuan memetakan dan menganalisa kondisi sosio kultural di tempat tugas;
4. Kemampuan untuk memfasilitasi proses penyadaran kepada perempuan dan laki-laki, tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Kemampuan untuk memotivasi perempuan agar memiliki keyakinan untuk berperan aktif dalam pembangunan;



6. Kemampuan memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam setiap tahap pelaksanaan PNPM-MP;
7. Kepekaan terhadap permasalahan perempuan perdesaan , khususnya perempuan miskin perdesaan. Sehingga dapat memunculkan semangat positif untuk belajar, peduli dan kreatif (<http://nmc.ppk.or.id>).

Fasilitator dibina untuk bekerja ekstra karena perempuan miskin perdesaan umumnya bersifat sangat tertutup, sehingga pemberdayaan untuk mereka membutuhkan kesabaran dan pendekatan secara personal / kelompok yang dilakukan secara intens serta melalui suasana informal. Perlu pemetaan dan pemahaman kondisi sosial kultural terlebih dahulu secara umum, sebelum Fasilitator mulai melakukan komunikasi intensif dengan perempuan perdesaan. Karena pada umumnya perilaku mereka sangat terikat dengan sosio kultural yang ada (Tempo, 16 Desember 2009).

Kemudian lagi, menurut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (*dalam* PTO PNPM-MP, 2008), kesetaraan gender sebagai pondasi utama pengarusutamaan gender juga mempunyai prinsip dasar dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Arti penting PNPM Mandiri terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga direalisasi melalui antara lain :

- Pertama, menggapai kebutuhan praktis perempuan dengan mendanainya, serta membantu menghilangkan hambatan praktis dari keterbatasan waktu dan kapasitas yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam pembangunan.
- Kedua, meningkatkan potensi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Melalui investasi dalam infrastruktur lokal seperti jalan dan jembatan yang membantu

menghilangkan beberapa kendala terhadap akses perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif dan mengembangkan usahanya.

- Ketiga, menjamin partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penekanan pada tingkat partisipasi secara luas yang dapat menghapuskan beberapa hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal, dan memastikan bahwa suara mereka terdengar dan bahwa mereka memiliki peluang untuk mempengaruhi proses dan keputusan agar lebih tanggap terhadap kebutuhan mereka.

Dengan karakteristik yang dimiliki PNPM-MP, setidaknya program ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis yang dimiliki pemerintah untuk menghapus hal-hal yang menghambat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan oleh karenanya juga akan meningkatkan keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

#### **4.5. Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam PNPM-MP**

Implementasi pengarusutamaan gender dalam penelitian ini dilihat pada tahapan perencanaan khusus musyawarah campuran PNPM-MP anggaran tahun 2010 di Nagari Batu Bulek. Implementasi pengarusutamaan gender dalam penelitian ini dilihat berdasarkan interpretasi subyektif pengelola dan pelaku PNPM-MP terhadap gender. Tujuannya adalah untuk mempelajari apakah dalam setiap alur kegiatan perencanaan sudah mempertimbangkan tiga aspek, yaitu peran, akses, kontrol perempuan. Artinya, apakah dalam ketiga hal tersebut sudah mempertimbangkan



bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah setara dan adil. Apakah akses yang diterima oleh laki-laki dan perempuan juga akan setara dan adil. Akhirnya, apakah laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan kontrol dan pengambilan keputusan.

#### **4.5.1. Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Tahapan Perencanaan PNPM-MP**

Pemahaman konsep perencanaan dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan Kartasmita (1997:48) yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan”. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang paling penting dari keseluruhan tahapan dalam proses pembangunan. Pada tahapan perencanaan akan dikumpulkan permasalahan sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat, kemudian menganalisisnya serta menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut.

Menurut Pjok PNPM-MP Kecamatan Lintau Buo Utara, Bapak ID dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahapan perencanaan merupakan tahapan yang paling awal dan paling vital dari keseluruhan tahapan program, karena tercapai atau tidaknya tujuan atau kegiatan program yang akan dilakukan sangat ditentukan oleh efektif atau tidaknya pendekatan perencanaan.

Pengelola PNPM-MP menyadari kaitan erat antara perencanaan dengan keberhasilan program. Sepereti yang dikemukakan oleh Bapak ID, selaku Pjok Kecamatan Lintau Buo Utara :

1. Kepala desa dan aparat desa,
2. Wakil RTM desa,
3. Wakil perempuan,
4. LSM/ormas,
5. Tokoh masyarakat, tokoh agama,
6. Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir (PTO PNPM-MP, 2008).

Berikut akan disajikan keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan 5 rangkaian kegiatan dalam tahapan perencanaan :

Tahap awal adalah Sosialisasi kepada berbagai elemen komunitas nagari. Menurut Fasilitator Pemberdayaan PNPM-MP, Bapak As terdapat tiga tujuan dari kegiatan ini pertama, untuk penyebarluasan informasi mengenai PNPM-MP kepada semua elemen dalam masyarakat, berkaitan dengan informasi pokok PNPM-MP meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, dan organisasi, kedua untuk mendapatkan kesepakatan/persetujuan dari masyarakat menerima atau menolak program PNPM-MP, dan ketiga untuk memilih pelaku-pelaku PNPM-MP Nagari yang terdiri dari : TPK (Tim Pengelola kegiatan), TPU (Tim Penulis Usulan), Tim Pemantau, Tim Pemelihara, serta KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari).

Sosialisasi di Nagari Batu Bulek dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Februari 2010 sesudah Sholat Isya yang bertempat di Masjid Raya Batu Bulek. Menurut Fasilitator Pemberdayaan PNPM-MP, semua masyarakat undang untuk menjadi peserta dalam kegiatan ini. Mekanisme undangan dilakukan dengan dua cara : pertama dengan menggunakan undangan resmi, yang ditujukan untuk wali nagari,



serta tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap perlu, kedua mengundang dengan cara memberikan pengumuman-pengumuman melalui masjid atau surau-surau.

Pada kegiatan pertama tahapan perencanaan di Nagari Batu Bulek, ada 100 undangan resmi yang disebarkan, terdiri dari 30 undangan untuk perempuan yang diperuntukan kepada *Bundo Kanduang*, Sekretaris Nagari dan perwakilan perempuan miskin, serta 70 undangan untuk laki-laki yang diberikan kepada *Niniak Mamak*, *Cadiak Pandai*, *alim Ulama*, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Selebihnya, masyarakat diundang dengan memberikan pengumuman di Masjid dan Surau.

Terjadi ketidakadilan gender dalam pemberian undangan resmi. Dimana undangan yang diberikan kepada perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan undangan untuk laki-laki. Hal ini dibenarkan oleh Bapak DE, selaku ketua UPK PNPM-MP yang mengemukakan:

Undangan lebih banyak diberikan kepada bapak-bapak karena untuk menghargai, biasanya bapak-bapak gengsinya jauh lebih tinggi dari perempuan apalagi yang nama nya niniak mamak, cadiak pandai, kalau tidak diberi undangan biasanya mereka tidak hadir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AS, selaku fasilitator pemberdayaan, peneliti menemukan dua faktor yang menyebabkan undangan resmi yang diberikan kepada laki-laki jauh lebih banyak dari pada perempuan. Pertama karena pengelola program mempunyai asumsi/interpretasi bahwa laki-laki cenderung ingin lebih dihargai. Akibatnya perempuan cenderung diletakan sebagai subordinat dari kaum laki-laki, apalagi laki-laki tersebut adalah orang yang dituakan/dihormati dalam masyarakat seperti *Alim Ulama*, *Niniak Mamak*, dan *Cadiak Pandai*, mereka malas hadir dalam suatu kegiatan apabila hanya diundang secara lisan saja.

Hal di atas juga didukung oleh Bapak AP, selaku *Niniak Mamak* yang dindang dalam kegiatan sosialisasi di Nagari Batu Bulek, yang mengemukakan :

*Yang namo e niniak mamak, alim ulama cadiak pandai memang harus diundang sacaro resmi, biaso e kami dak datang kalau diundang jo panyampaian lisan jo. Samo la misal e diundang untuak boleh, yo harus mambaok siriah kalau ondak maundang ughang-ughang yang dituon dalam nagari ko. Yang namanya niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, memang harus diundang secara resmi, tidak cukup hanya dengan undangan secara lisan saja.*

Pengelola program mempunyai interpretasi tersendiri mengenai laki-laki dan perempuan yang dipahaminya melalui interaksi selama ini dengan menggunakan simbol-simbol yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Interpretasinya cenderung mensubordinasi perempuan atau lebih mengutamakan laki-laki. Hal ini terjadi karena pengalamannya dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator yang sudah cukup lama. Dalam perjalanannya sebagai fasilitator ia selalu belajar dan berusaha memaknai orang-orang yang ada disekitarnya, karena hampir setiap daerah yang sudah ia bimbing selalu ada asumsi/interpretasi yang berkembang bahwa laki-laki cenderung ingin lebih dihargai, dari sinilah ia mulai berfikir dan membuat interpretasi sendiri mengenai laki-laki dan perempuan. Interpretasinya inilah yang mempengaruhi tindakannya dalam hal pemberian undangan resmi kepada masyarakat.

Kedua karena pengelola mempunyai asumsi bahwa jumlah laki-laki yang dihargai/dituakan dalam masyarakat Nagari Batu Bulek jauh lebih banyak dari pada perempuan. Asumsinya tersebut muncul karena tiga hal, pertama ia berpedoman pada jumlah keanggotaan dalam Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Batu Bulek yang terdiri dari niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang, serta pemuda. Dimana dari 14 orang keanggotaanya terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 12



(dua belas) orang laki-laki. Kedua dari proses interaksi dengan pegawai di kantor Wali Nagari, serta anggota masyarakat di Nagari Batu Bulek yang juga cenderung memiliki asumsi yang sama. Terakhir, karena pengalamannya selama ini, dimana hampir disetiap daerah yang ia bina selalu lebih banyak laki-laki yang dituakan/dihormati dalam masyarakat ketimbang perempuan. Dari hasil interaksi dan pengalamannya tersebut, dengan kemampuan berfikir yang ia miliki, pengelola program menginterpretasikan sendiri. Interpretasinya inilah yang menuntun tindakannya dalam melaksanakan tugas di masyarakat. Kenyataan diatas sangat sesuai dengan asumsi yang dikemukakan oleh Blumer *dalam* (Poloma, 2003 : 258) yang mengemukakan bahwa *“manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu tersebut, makna tersebut diperoleh dari hasil interaksi, dan selalu disempurnakan saat proses interaksi social sedang berlangsung”*.

Interpretasi pengelola program yang cenderung mensubordinasi perempuan akhirnya mempengaruhi keterlibatan perempuan. Sesuai dengan pemberian undangan yang lebih banyak diberikan kepada laki-laki dari pada perempuan, kehadiran laki-laki pun jauh lebih banyak dibandingkan dengan kehadiran perempuan. Dimana dari 63 orang yang hadir dalam kegiatan sosialisasi di Nagari ini terdiri dari 43 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.

Walaupun perempuan yang hadir dalam kegiatan sosialisai di Nagari Batu Bulek jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kehadiran laki-laki. Namun kehadiran perempuan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk berlangsungnya kegiatan sosialisasi di nagari ini, karena dalam ketentuan PNPM-MP setiap kegiatan yang dilakukan minimal terdapat 30% keterlibatan perempuan.

Pengelola PNPM-MP puas dengan kehadiran perempuan yang 30% ini.

Seperti yang dikemukakan Fasilitator Pemberdayaan PNPM-MP dan Pjok PNPM-MP:

Alhamdulillah kegiatan Sosialisasi Nagari berjalan dengan lancar, masyarakat dengan senang hati menerima program ini. Kehadiran perempuan juga sudah mencapai 30 %. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam PNPM-MP

Pengelola program kurang menyadari bahwa perempuan cenderung tidak hadir jika undanganya hanya melalui pengumuman di Masjid atau di Surau. Karena pada dasarnya perempuan juga ingin dihargai, selama ini kurang terlibatnya perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat karena mereka kurang dihargai dan selalu diletakan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki.

Seperti yang dikemukakan oleh seorang guru di Nagari Batu Bulek, Ibu NN:

*Ibu dak ado di undang do male ibuk nyo, biaso e kalau kegiatan yang diumumkan di masojik di, apak-apak yang banyak hadirnyo. Dak ado bkawan disitu.* Ibu tidak diundang, jadi ibu malas datang karena biasanya kalau yang diumumkan di masjid-masjid seperti itu, bapak-bapak saja yang hadir.

Selain faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, faktor lainnya yang membuat rendahnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosialisasi di Nagari ini adalah karena waktu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Sehingga perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga susah untuk meninggalkan rumah. Apalagi jika mereka sedang mempunyai anak yang masih kecil. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu MR, salah seorang perempuan yang diundang, namun ia tidak hadir dalam kegiatan tersebut :

*Kalau acara e malam-malam bontuak itu, yo kami amak-amak ko susah untuak kaluau uma, sobok e jo siapa anak kami tinggau lai. Kalau acara e*



*siang mungkin kami bisa jo mausahoan untuk ikui, kalau siang lai anak-anak sibuk main jo kawan-kawane. Kalau acaranya malam seperti itu, kami ibu-ibu memang susah meninggalkan rumah, dengan siapa anak kami yang masih kecil tinggal. Kalau siang mungkin kami masih bisa mengusahakan untuk ikut, karena pada siang hari anak-anak lebih sibuk bermain.*

Interpretasi perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang harus mengurus semua kebutuhan rumah, termasuk mengasuh anak membuat perempuan tidak bebas bergerak dan berkecimpung dalam kegiatan masyarakat. Stereotipe yang melekat pada perempuan tersebut terjadi melalui proses yang panjang yang dibentuk melalui interaksi, sosialisasi terus menerus, yang kemudian diinterpretasikan sendiri oleh pelaku-pelaku PNPM-MP.

Tidak hanya perempuan yang sudah berkeluarga yang malas mengikuti kegiatan pada malam hari, bahkan perempuan yang belum berkeluarga pun cenderung malas hadir jika kegiatan dilakukan pada malam hari, karena dalam masyarakat berkembang stereotipe bahwa gadis yang keluar malam, dianggap gadis yang kurang benar, dan digunjingkan oleh masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh HL :

*Tu la kalau kaluaw malam di kam dak elok pandangan masyarakat do, nyo ughang di dak kan amua tau do awak di kaluaw mangapa.* Itu lah biasanya kan kalau gadis keluar malam sering digunjingkan, mereka juga tidak mau tahu kadangan tujuan kita itu keluar untuk apa.

Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa terdapat marginalisasi terhadap keterlibatan perempuan dalam PNPM-MP. Dimana perempuan mempunyai keinginan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, namun mereka terhalangi karena waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak memungkinkan mereka untuk hadir. Perempuan

yang hadir cenderung yang tempat tinggal/rumahnya dekat dengan tempat pelaksanaan kegiatan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu EE :

*Uma ibu dek lai dokek jo tompek kegiatan dilakukan di, tu dek lai bisa datang, kok jauh malam-malam bontuak ko dak lo tolok do.* Rumah ibu sangat dekat sekali dengan tempat kegiatan dilakukan, makanya ibu bisa hadir, kalau seandainya jauh, ya belum tentu juga bisa hadir, karena kan acaranya di malam hari.

Seandainya pengelola program bisa mengorganisir berbagai pertemuan/kegiatan pada saat yang nyaman untuk perempuan dan bagi yang sudah berkeluarga juga bisa membawa anak-anak mereka, tentu akan lebih banyak perempuan yang hadir. Karena salah satu hambatan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat adalah karena mereka tidak bisa meninggalkan anak-anak mereka di rumah, apalagi anak-anak mereka tersebut masih kecil sehingga harus selalu dekat dengan ibunya.

Jika dilihat dari kedudukan sosial perempuan yang hadir, 90% perempuan yang hadir berkedudukan sosial sebagai istri (ibu rumah tangga), yang berlatar belakang pendidikan tamatan SLTP. Kedudukan sebagai istri yang tergantung pada penghasilan suami membuat mereka tidak terbiasa banyak bicara serta mengemukakan pendapat. Adanya subordinasi terhadap perempuan dalam keluarga membuat perempuan tidak memiliki peluang untuk mengambil keputusan bahkan yang, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam rumah tangga selalu didominasi oleh suami mereka.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu UA:

*Biaso e yang mambiak keputusan dalam keluarga memang apak-apak. Sobok inyo yang mancai.* Biasanya yang mengambil keputusan dalam keluarga memang bapak, karena dia yang bekerja dan mencari uang.



Ungkapan tersebut juga didukung oleh Bapak UJ :

*Kalau ibu-ibu di tangguang jawab e yo bahubuangan jo kabutuhan uma tangga, kalau masalah pontiang misal e pendidikan anak, tontu kami yang mancai piti yang mambiak keputusan. sobok e harus dissuaian jo kemampuan kami.* Ibu-ibu tugasnya memang untuk mengatur kebutuhan rumah tangga. tetapi kalau masalah yang penting misalnya saja mengenai pendidikan anak, tentu kami sebagai bapak yang mengambil keputusan karena hal ini sangat berkaitan dengan penghasilan serta kemampuan kami.

Kedudukan sosial perempuan sebagai istri yang mempunyai ketergantungan dalam ekonomi terhadap suami serta tingkat pendidikan yang rendah membuat perempuan terinterpretasikan sebagai makhluk yang lemah, tidak bisa merdeka dan lelausa dalam mengemukakan pendapat dalam keluarga. Karena perempuan yang tidak mempunyai kedudukan sosial yang bagus dalam masyarakat, cenderung segala sesuatunya diambil atas dasar keputusan suami, suami adalah pemimpin keluarga. Hal ini juga berimplikasi terhadap keterlibat mereka dalam tahapan perencanaan PNPM-MP, Akibatnya keterlibatan mereka dalam rapat cenderung sebagai pelengkap agar kegiatan tersebut bisa berlangsung. Perempuan masih jarang sekali berbicara untuk mengemukakan pendapat dalam kegiatan tersebut. Kebanyakan perempuan yang hadir hanya duduk dan mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu UP dan Ibu LN :

*Kami male mangecek kalau ado suami kami dalam ruangan tu, ntah sogan jo gaso e.* Kami malas berbicara jika ada suami kami dalam ruangan tersebut, tidak tau kenapa segan saja rasanya.

Lain halnya dengan sebagian kecil perempuan yang juga berkedudukan sosial sebagai istri tetapi mereka mempunyai kedudukan sosial yang bagus dalam masyarakat, misalnya *Bundo Kanduang*. Kedudukannya sebagai bundo kanduang membuat perempuan mempunyai kekuatan tersendiri dalam diri mereka, sehingga

membuat mereka lebih leluasa mengemukakan pendapat dan berbicara di depan umum. Merekapun sangat kritis dalam bertanya dan mengemukakan pendapat.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak AS, Selaku Fasilitator Pemberdayaan PNPM-MP :

Diakui memang kebanyakan perempuan yang hadir, cenderung diam. Namun tentu ada juga perempuan yang berbicara. Ada sekitar dua orang perempuan yang berbicara waktu itu. Namun memang mereka mempunyai latar belakang pendidikan maupun kedudukan sosial yang lebih baik.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu MZ, selaku *Bindo Kanduang* yang hadir dan berbicara dalam kegiatan tersebut :

*Ibu lai batanyo dalam kegiatan tu nyo, yang ibuk tanyoan apo dek Cuma 25 porsen dana yang untuak simpan pinjam ibuk-ibuk tunyo, kecek e program ko bapihak ka perempuan.* Ibu ikut bertanya dalam kegiatan tersebut, yang ibu tanyakan mengapa hanya 25 % dana yang untuk simpan pinjam perempuan, katanya program ini lebih berpihak kepada perempuan.

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa, ada perempuan yang berbicara dan mengemukakan pendapat dalam kegiatan tersebut. Namun memang mereka cenderung mempunyai kedudukan sosial yang bagus dalam masyarakat. Interpretasi mengenai perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak bisa mengambil keputusan tidak berlaku apabila di dalam keluarganya mereka diberi ruang/kesempatan untuk berkarya dalam masyarakat.

Dengan demikian, sangat disayangkan apabila perempuan-perempuan lain yang mempunyai potensi dan memiliki kualitas yang lebih baik tidak diundang juga dalam kegiatan tersebut. Padahal dari hasil wawancara dengan Wali Nagari Batu Bulek, terdapat lebih kurang 1500 orang perempuan di Nagari Batu Bulek yang berpendidikan SLTA/Sederajat sampai dengan S1 (Strata Satu), tentu ini merupakan



potensi yang bagus jika bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun hal ini kurang disadari oleh pengelola program. Hal ini terjadi karena pengelola cenderung lebih mengutamakan mengundang laki-laki yang lebih dituakan dan dihormati dalam masyarakat. Sehingga perempuan-perempuan yang berkualitas yang mungkin akan memberikan sumbangsih terhadap kegiatan tersebut akhirnya terlupakan.

Jika pengelola program juga lebih memperhatikan untuk mengundang dan mengajak perempuan yang mempunyai kedudukan sosial yang bagus serta mempunyai latar belakang pendidikan yang lebih baik tentu akan bisa membimbing perempuan-perempuan lainnya untuk aktif dalam kegiatan tersebut, karena pada dasarnya perempuan lebih mudah mengemukakan sesuatu kepada sesama perempuan. Akhirnya memberikan sumbangsih yang berguna dan bermanfaat demi kelancaran program.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa terdapat tiga tujuan dari kegiatan ini, pertama untuk menganalkan PNPM-MP kepada masyarakat, kedua untuk mendapatkan kesepakatan dari masyarakat untuk menolak atau menerima PNPM-MP di nagari ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UPK, bapak DE, semua masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut menerima pelaksanaan PNPM-MP di Nagari ini.

Setelah semua masyarakat menerima keberadaan program ini, maka dilakukanlah pemilihan untuk menjadi pelaku-pelaku PNPM-MP, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota TPK (Tim Pengelola kegiatan), 6 (enam) orang TPU (Tim

Penulis Usulan), 3 (tiga) orang Tim Pemantau, 3 (tiga ) orang Tim Pemelihara, serta 12 (dua belas) orang KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari).

Dari hasil wawancara dengan fasilitator pemberdayaan PNPM-MP, pencalonan untuk menjadi pelaku-pelaku PNPM-MP di nagari di lakukan oleh masyarakat itu sendiri, mereka yang memilih, menilai dan menunjuk yang menurut mereka pantas untuk menduduki posisi tersebut. Dalam proses tersebut ada 33 orang yang dicalonkan, terdiri dari 21 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dalap di lihat pada tabel 5.1

**Tabel 4.5. Pencalonan Sebagai Pelaku-Pelaku Dalam Organisasi PNPM-MP  
Nagari Batu Bulek**

NO	Nama	JK	Posisi
1.	UK	Laki-Laki	Ketua TPK
2.	BY	Laki-Laki	
3.	UD	Laki-Laki	
4.	MZ	Perempuan	
5.	JS	Laki-Laki	Sekretaris UPK
6.	DM	Laki-Laki	
7.	LN	Perempuan	
8.	YN	Perempuan	Bendahara UPK
9.	MN	Perempuan	
10.	RS	Perempuan	Anggota TPU
11.	IR	Perempuan	
12.	NR	Laki-Laki	
13.	DR	Laki-Laki	
14.	DN	Laki-Laki	
15.	UJ	Laki-Laki	
16.	FN	Perempuan	Tim Pmantau
17.	AN	Laki-Laki	
18.	NS	Laki-Laki	
19.	RS	Perempuan	Tim Pemelihara
20.	BN	Laki-Laki	
21.	RK	Laki-Laki	



22.	MD	Laki-Laki	Anggota KPMN
23.	TN	Laki-Laki	
24.	MO	Laki-Laki	
25.	KK	Laki-Laki	
26.	BN	Laki-Laki	
27.	JK	Laki-Laki	
28.	NK	Laki-Laki	
29.	BJ	Laki-Laki	
30.	TN	Perempuan	
31.	TV	Perempuan	
32.	RK	Perempuan	
33.	NN	Perempuan	

Sumber : Hasil Penelitian Mei-Juni 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah perempuan yang dicalonkan cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Dalam pencalonan tersebut juga terjadi subordinasi terhadap perempuan, akibatnya perempuan belum ditunjuk dan dipercayai untuk menduduki posisi utama sebagai ketua, sebagian besar yang diajukan sebagai calonnya adalah masyarakat laki-laki hanya ada satu orang perempuan yang ditunjuk untuk dicalonkan sebagai ketua dalam organisasi PNPM-MP tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu MZ :

*Ibu dicalonan untuak manjadi ketua TPK waktu itu, tapi memang ibu olun tapiliah lai. Saya dicalonkan sebagai ketua TPK waktu itu, tetapi memang saya belum terpilih untuk menduduki posisi tersebut*

Interpretasi bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin dalam keluarga, berimplikasi terhadap pemilihan ketua dalam organisasi PNPM-MP di Nagari Batu Bulek. Akibatnya, walaupun ada perempuan yang dicalonkan dan mencalonkan diri untuk menduduki posisi utama (ketua) dalam organisasi pelaku-pelaku PNPM-MP di nagari ini. Namun mereka belum dipercayai untuk menduduki posisi tersebut.

Perempuan lebih cenderung dipilih dan dipercayai untuk menduduki posisi seperti bendahara, sekretaris, atau hanya sebagai anggota saja.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak BY, selaku pelaku PNPM-MP Nagari Batu Bulek :

*Induak-induak lobiah cocok untuak jadi bendahara, sobok e inyo la biaso ma atur piti dalam uma tangga,* Perempuan memang lebih cocok menduduki posisi sebagai bendahara karena mereka sudah terbiasa mengatur keuangan dalam rumah tangga.

Sebagian besar laki-laki yang hadir berasumsi bahwa laki-laki lah yang lebih pantas dan tepat untuk menduduki posisi sebagai ketua dalam organisasi PNPM-MP di Nagari. Asumsinya tersebut bersumber dari interpretasi bahwa laki-laki adalah makhluk yang rasional dan tegas, sehingga sangat pantas menjadi seorang pemimpin baik dalam keluarga maupun masyarakat. Asumsi semacam ini selalu disosialisasikan, sehingga kedudukan perempuan selalu diposisikan di bawah laki-laki.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Buyung :

*Yang lobiah banyak dicalonan untuak jadi katua yo apak-apak, sesuai jo pemimpin dalam uma tanggo kan apak-apak lo*  
Yang lebih banyak dicalonkan untuk menjadi ketua memang lebih banyak laki-laki atau bapak-bapak saja, lagi pula yang menjadi pemimpin dalam keluarga biasanya juga laki-laki

Hal di atas didukung oleh Ibu MR, LN, dan EE :

*Apak-apak bontuak e memang lobiah mamilih apak-apak lo untuak manjadi katua, yo kami manuwuik jo lai nyo, nyo apak-apak di yang banyak hadir.* Laki-laki yang hadir memang lebih cenderung memilih laki-laki juga untuk menjadi ketua, ya kami ikut saja lagi, karena mereka yang paling banyak hadir.



Dari wawancara di atas terlihat sekali, adanya pemikiran dan asumsi bahwa perempuan menduduki posisi kedua setelah laki-laki. Terjadi subordinasi terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga, maupun dalam masyarakat. Akibatnya belum ada perempuan yang ditunjuk untuk menduduki posisi utama seperti ketua dalam organisasi PNPM-MP di nagari. Dalam posisi ini peneliti bukan memaksakan bahwa perempuan harus menduduki posisi utama atau harus menjadi seorang pemimpin, tetapi kembali lagi peneliti berpedoman pada ketentuan dalam PNPM-MP yang tidak membatasi siapapun untuk menduduki posisi utama dalam organisasinya.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa interpretasi pengelola dan pelaku-pelaku PNPM-MP terhadap laki-laki dan perempuan mempengaruhi keterlibatan perempuan. Akibatnya secara kuantitas (kehadiran) keterlibatan perempuan jauh lebih rendah dari pada laki-laki. Keterlibatan perempuan secara kualitas (berbicara, mengemukakan pendapat dan saran) juga belum maksimal, sebagian besar dari perempuan yang hadir cenderung diam dalam kegiatan tersebut. Hanya ada 2 orang perempuan yang berbicara dalam kegiatan tersebut, mereka cenderung mempunyai kedudukan sosial yang bagus dalam masyarakat. Seterusnya, peran perempuan dalam organisasi PNPM-MP juga masih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan juga belum dipercayai dan ditunjuk untuk menduduki posisi utama (ketua), padahal ada perempuan yang mencalonkan diri untuk menduduki posisi tersebut.

Tahap Kedua dari kegiatan perencanaan adalah Penggalan Gagasan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan Klasifikasi Kesejahteraan dan Pemetaan Sosial serta menemukan gagasan-gagasan kegiatan maupun visi ke depan dari

masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan penyebab kemiskinan, berdasarkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki.

Musyawarah penggalian gagasan ini dilaksanakan beberapa kali pada setiap jorong yang ada di Nagari Batu Bulek, dan dimulai pada tanggal 25 Maret s/d 9 April 2010. Rincian pelaksanaan pada masing-masing jorong di Nagari Batu Bulek sebagai berikut :

Tabel 4.6. Pelaksanaan Musyawarah Penggalian Gagasan

NO	Jorong	Tanggal Pelaksanaan	Peserta		
			Jumlah	Lk-Lk	PR
1.	Pasa Senayan	25 Mar s/d 1 Apr	88	59	29
2.	Simpang	28 Mar s/d 11 Apr	90	51	39
3.	Aua Duri	2 Apr s/d 6 Apr	113	69	44
4.	Patar	28 Mar s/d 2 Apr	92	52	40
5.	Alua Tanga	3 Apr s/d 6 Apr	56	36	20
6.	Ladang Laweh	29 Mar s/d 4 Apr	65	42	23
7.	Kawai	4 Apr s/d 10 Apr	47	20	27
8.	Lasuang Batu	30 Mar s/d 6 Apr	63	33	30
9.	Pato	28 Mar s/d 4 Apr	81	50	41

Sumber : Laporan Kegiatan PNPM-MP Batu Bulek 2010

Dari tabel di atas, terlihat kehadiran masyarakat perempuan selalu lebih sedikit dibandingkan dengan kehadiran masyarakat laki-laki. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan, sama seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa rendahnya keterlibatan perempuan disebabkan karena kurangnya penghargaan terhadap perempuan, dimana jumlah undangan yang diberikan kepada laki-laki jauh lebih banyak dari pada perempuan serta waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak memungkinkan untuk perempuan hadir, karena seringkali kegiatan dilakukan pada malam hari.



Berdasarkan fakta lapangan, perempuan akan mau ikut andil dalam kegiatan jika mereka memiliki teman yang mau bersama-sama mengikuti kegiatan. Ini akibat “budaya rikuh” dan malu masih ada jika mereka harus sendiri di tengah forum yang mayoritas laki-laki. Karena selama ini setiap kegiatan yang dilakukan dimalam hari selalu lebih banyak laki-laki yang hadir membuat perempuan malas untuk mengikutinya.

Seperti yang dikemukakan oleh ibu MR :

*Biasonyo yo kegiatam-kegiatan di lobiah banyak laki-laki e yang datang, tu la kami male, tapi kalau-ibu-ibu e banyak lo dak gai do. Biasanya lebih banyak laki-laki yang datang, itulah sebabnya kami malas. Tetapi jika perempuannya juga banyak tidak apa.*

Sebelum melaksanakan musyawarah penggalan gagasan untuk membuat pemetaan sosial kemiskinan, anggota masyarakat yang terpilih menjadi KPMN dilatih terlebih dahulu. Setelah dilatih anggota KPMN akan melakukan proses fasilitasi kepada masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD). Yaitu melakukan pemetaan kemiskinan dalam kerangka menggali faktor-faktor penyebab kemiskinan di Nagari Batu Bulek. Sekaligus memfasilitasi kriteria-kriteria kemiskinan di tingkat nagari yang disepakati oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menemukan sendiri penyebab dan faktor kemiskinan serta dapat merumuskan dengan sendirinya kriteria miskin yang ada di kelurahan atau desanya.

Dari 6 orang anggota KPMN yang dilatih, hanya terdiri dari 2 orang perempuan. Posisi perempuan dalam keanggotaan KPMN hanya sebagai sekretaris dan anggota, yang beri tugas untuk mencatat hasil musyawarah penggalan gagasan. Perempuan tidak diberikan ruang untuk memimpin jalannya musyawarah, karena

ada kecenderungan serta asumsi dalam masyarakat yang lebih mempercayai laki-laki untuk memimpin suatu musyawarah.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak UD :

*Kalau untuk yang mamimpin gapek atau musyawarah memang lobiah ancak laki-laki, sobok e lai tegas suawo e. Kalau untuk memimpin rapat memang lebih bagus diberikan kepadalaki-laki karena laki-laki lebih tegas.*

Padahal belum tentu perempuan tidak mampu memimpin jalannya musyawarah. Seharusnya pemilihan tersebut didasarkan atas kemampuan yang dimiliki bukan dari ditentukan perbedaan gender yang cenderung menomorduakan perempuan. Akibatnya hal ini sangat berpengaruh terhadap jalannya musyawarah, dimana perempuan yang mempunyai kedudukan sosial hanya sebagai istri dalam keluarga miskin khususnya, cenderung tidak berani mengemukakan pendapatnya. Hal ini tentu sangat disayangkan karena sebagian besar peserta perempuan dalam kegiatan ini adalah perempuan-perempuan dari keluarga miskin yang memang hanya mempunyai kedudukan sosial sebagai istri dalam keluarganya.

Pengelola program kurang menyadari bahwa perempuan sulit mengemukakan pendapatnya jika berhadapan dengan laki-laki. Seandainya yang memimpin musyawarah adalah perempuan tentu akan banyak gagasan-gagasan yang muncul dari perempuan, karena biasanya perempuan lebih mudah untuk menyampaikan segala hal dengan sesama perempuan.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu MZ, selaku *Bundo Kanduang* :

*pangalaman salamo ko, memang induak-induak ko lobiah mudah mangecek jo sasamo padusi lo. Pengalaman selama ini memang perempuan lebih mudah untuk mengemukakan sesuatu dengan sesama perempuan*



Selain perempuan kurang diberikan kesempatan untuk menduduki posisi yang menentukan dalam kegiatan yang dilakukan. Pelaku PNPM-MP laki-laki juga merasa mereka lebih tahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, apalagi yang bersangkutan dengan pembangunan fisik. Pada kegiatan ini laki-laki lebih mendominasi, dan berasumsi hal ini bukan ruang lingkup perempuan, karena perempuan diinterpretasikan sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya dianggap lebih tepat di dapur. Akhirnya pelaku-pelaku PNPM-MP laki-laki berasumsi bahwa perempuan hanya tahu mengenai urusan dapur. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak UJ:

*Padusi mano lo kan tau jo permasalahan bontuak iko, yang nyo tau masalah dapur. Perempuan mana mengerti dengan masalah seperti ini, perempuan hanya tau masalah dapur saja.*

Akibatnya perempuan terhambat untuk mengemukakan pendapatnya. Berawal dari keluarga, dimana perempuan kurang diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat hal ini juga berpengaruh dalam musyawarah yang dilakukan di nagari. Sebenarnya perempuan juga mempunyai pendapat mengenai kemiskinan di nagari mereka, karena mereka dianggap kurang tahu dan tidak mengerti, seringkali kesempatan perempuan untuk mengemukakan gagasannya terhalangi.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu MR :

*Lai ado sabananyo yang kan disampaiannya, tapi dak tau bakpo caro manyampaian e di do. Apo lagi apak-apak nyo la sibuk sughang lo. Sebenarnya ada yang ingin disampaikan, tapi bingung cara penyampainnya. Apalagi yang memimpin musyawarah laki-laki, jadinya mereka sibuk sendiri saja.*

Dari hasil wawancara dengan perempuan yang hadir dalam kegiatan tersebut, ada perempuan yang ingin menyampaikan gagasannya, namun mereka bingung bagaimana cara penyampaian, ditambah lagi mereka berhadapan dengan pemimpin musyawarah dari laki-laki. Ironisnya, walaupun perempuan kurang dalam penyampaian aspirasi mengenai kemiskinan di nagari mereka, namun mereka menjadi bagian dalam musyawarah tersebut, serta menyetujui keputusan akhir yang diambil, sehingga keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut dianggap keputusan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, masalah paling mendasar yang menyebabkan perempuan kurang atau tidak berminat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan ini adalah karena kurangnya penghargaan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, yang berhak menentukan pemecahan masalah yang dihadapinya.

Tahap ketiga, Musyawarah Perencanaan. Musyawarah Nagari Perencanaan di Nagari Batu Bulek dilaksanakan pada tanggal 15 April 2010 setelah Sholat Isya. Bertempat di Masjid Raya Batu Bulek. Kegiatan ini dihadiri oleh 62 peserta, yang terdiri dari 43 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Kehadiran perempuan masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan kehadiran laki-laki. Faktornya masih sama yaitu karena kegiatan dilakukan pada malam hari. Ditambah lagi pada kegiatan ini memang tidak terlalu banyak undangan yang disebarkan. Undangan terhadap masyarakat hanya diumumkan lewat masjid dan surau-surau.



Musyawarah Perencanaan bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan yang didapat dari musyawarah penggalan gagasan di seluruh jorong yang ada di Nagari Batu Bulek kemudian diusulkan pada musyawarah antar nagari. Dari musyawarah penggalan gagasan di Nagari Batu Bulek, telah didapatkan hasil dari tahap Pemetaan Sosial Kemiskinan ditingkat nagari sebagai berikut :

#### Frofil RTM (Rumah Tangga Miskin ) Secara Ekonomi

Ciri-cirinya	Kriteria
1. Berpenghasilan rendah	1. Penghasilan antara Rp 300.000-Rp750.000/bulan
2. Kurang Modal	2. Tidak punya tabungan
3. Kepemilikan lahan garapan kurang	3. Memiliki lahan garapan seluas $\frac{1}{4}$ Ha-1 Ha
4. Kepemilikan lahan rumah dan pekarangan sempit	4. Kepemilikan rumah dan lahan pekarangan -Luas rumah 24 m <sup>2</sup> -Luas pekarangan 80m <sup>2</sup> -150m <sup>2</sup>
5. Kurangnya lapangan pekerjaan	5. Pekerjaan tidak tetap
6. Kepemilikan perabot rumah tangga	6. a. Kepemilikan perabot rumah tangga hanya perabotan yang pokok saja b. Tidak memiliki kendaraan bermotor kecuali digunakan untuk usaha kecil dan pemenuhan kebutuhan pokok saja, minimal 1 unit
7. Pemeliharaan kesehatan kurang	7. Berobat secara tradisional atau memakai kartu Askes Gakin

#### Frofil RTM (Rumah Tangga Miskin ) Secara Sosial

Ciri-ciri	
1. Berpendidikan formal rendah	1. Pendidikan formal SD-SMP
2. Banyak tanggungan	2. Jumlah tanggungan 1-4 orang
3. Kurang mampu menyekolahkan anak	3. Kemampuan menyekolahkan anak 1-2 orang
4. Kondisi cacat fisik/mental	4. Cacat permanent yang tidak mampu berusaha
5. Kurang keterampilan	5. Tidak memiliki keterampilan tertentu

Secara Fisik/Lingkungan

### Ciri-ciri

- Kesehatan kurang terjamin
- Ketersediaan fasilitas pendukung kesehatan :
  - a. Tidak ada WC

*Sumber : Hasil Penelitian Mei-Juni 2010*

Hasil penyusunan peta sosial inilah yang dipakai untuk dasar menggali gagasan masyarakat sebagai kebutuhan dan berguna bagi mayoritas RTM, serta dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melaksanakan dan memantau tahapan PNPM-MP, seperti penulisan usulan, verifikasi, musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Sehingga sangat disayangkan sekali dari pemetaan sosial tersebut hanya terdapat beberapa indikator yang dikemukakan oleh perempuan diantaranya mereka mengusulkan mengenai, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, seperti menjahit dan memasak, penambahan modal, kemudian perempuan juga lebih memperhatikan masalah masyarakat jompo/lansia dan masyarakat cacat mental/fisik.

Namun, setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan perempuan, ternyata sebagian gagasan yang disampaikan oleh laki-laki, sebenarnya juga telah terpikirkan untuk mereka sampaikan, tetapi mereka bingung cara penyampainnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu EE , MR, dan UA :

*Sabonau e yang diampai dek laki-laki di lai lo tapikian dek kaminyo, tapi kami dak tau caro manyampaian e do. Sebenarnya pendapat yang disampaikan oleh laki-laki juga sudah terpikirkan oleh kami. Namun masih bingung cara penyampainnya.*

Adapun usulan yang berhasil dikumpulkan melalui musyawarah penggalian gagasan dari setiap jorong di Nagari Batu Bulek adalah :



1. Pasa Senayan : Sarana air bersih, PAUD
2. Simpang : Rigid Beton, PAUD, Pembukaan jalan Baru
3. Aua Duri : Pembukaan Jalan Baru, PAUD
4. Patar : PAUD Rigid Beton
5. Alua Tanga : Air Bersih, PAUD
6. Ladang Laweh : PAUD, Jalan Baru, Rigid Beton
7. Kawai : Jembatan, Jalan Baru, PAUD
8. Lasuang Batu : Jalan Baru, PAUD
9. Pato : PAUD, Jembatan, Jalan Baru

Berawal dari musyawarah penggalian gagasan, dimana perempuan kurang mendapat kesempatan untuk menentukan usulan-usulan yang akan dilakukan demi kebaikan nagari. Secara tidak langsung pada Musyawarah Nagari Perencanaan, perempuan juga tidak memiliki kontrol yang begitu besar dalam pengambilan keputusan terhadap usulan-usulan yang akan diajukan ke MAN, karena kebanyakan usulan-usulan yang muncul pada musyawarah penggalian gagasan bersumber dari laki-laki. Tentu perempuan kembali menjadi pendengar yang baik serta menjadi pengikut saja dalam keputusan yang akan diambil. Karena setiap alur kegiatan dalam perencanaan saling berkaitan, apabila dari awal kurang terlibat secara otomatis pada kegiatan selanjutnya akan menjadi pengikut dari keputusan yang sudah diambil dan direncanakan sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Fasilitator, AS :

Setiap alur kegiatan yang ada dalam perencanaan itu saling berkaitan. Sehingga apabila tidak mengikuti proses dari awal, secara otomatis telah menyetujui keputusan yang diambil pada musyawarah Pertama.

Akibatnya perempuan harus ikut terhadap usulan-usulan yang dikemukakan oleh masyarakat laki-laki. Usulan masyarakat perempuan mengenai pengadaan pelatihan untuk peningkatan keterampilan masyarakat, juga belum dipertimbangkan untuk diajukan dalam MAN, karena sebagian besar masyarakat laki-laki yang hadir beranggapan bahwa masih ada kebutuhan lain yang lebih penting dari pada pelatihan tersebut.

Selain untuk menapkan usulan nagari, musyawarah ini juga bertujuan untuk memilih satu orang yang akan diusulkan untuk menjadi calon pengurus UPK dan pengamat pada musyawarah antar nagari prioritas usulan. Dari musyawarah yang dilakukan yang dicalonkan untuk menjadi pengurus UPK dan pengamat musyawarah antar nagari prioritas usulan adalah masyarakat laki-laki.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak UJ, selaku pelaku PNPM-MP Nagari Batu Bulek :

*Dalam pancalonan untuak manjadi pangurus UPK ko memang sbagian godang masyarakat lobiah manunjuan laki-laki karena tugasnya berat. Dalam pencalonan untuk menjadi pengerus UPK memang sebagian besar masyarakat lebih memilih masyarakat laki-laki, karena tugasnya berat.*

Masyarakat beranggapan bahwa yang akan diutus untuk menjadi calon pengurus UPK di kecamatan adalah benar-benar orang yang mempunyai kesanggupan untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dan mempunyai waktu untuk melakukan tugas-tugasnya tersebut. Makanya perempuan diasumsikan kurang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas sebagai pengurus UPK, karena mereka memiliki tugas-tugas rumah tangga yang tidak bisa ditinggalkan.



Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Angkuto, selaku pelaku PNPM-MP

Nagari Batu Bulek :

*Kalau ibu-ibu yang ditunjuk untuak majadi pengurus UPK, itu karojo yang dak mungkin jonye ndi, sobok e nyo punyo tugas suwang lo di uma tanggo.* Kalau perempuan atau Ibu-Ibu yang ditunjuk untuk menjadi pengurus UPK, itu tidak mungkin, karena mereka mempunyai tugas rumah tangga yang tidak bisa ditinggalkan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan musyawarah perencanaan keterlibatan perempuan masih rendah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pendapat perempuan kurang dihargai karena ada asumsi bahwa kegiatan tersebut bukan ruang lingkup perempuan. Seterusnya dalam pencalonan untuk menduduki posisi UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di kecamatan juga belum diberikan kesempatan kepada perempuan, kerana ada asumsi bahwa perempuan tidak mampu untuk menduduki posisi tersebut.

Tahap keempat, Pelaksanaan Penulisan Usulan. Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan Nagari yang diajukan pada MAN. Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam forum musyawarah nagari perencanaan. Musyawarah penulisan usulan di Nagari Batu Bulek dilaksanakan pada tanggal 25 April 2010. Kegiatan ini dihadiri oleh 78 peserta yang terdiri dari 48 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Sudah ada sedikit peningkatan keterlibatan perempuan, namun jumlah mereka tetap lebih sedikit jika dibandingkan dengan peserta laki-laki.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa setiap alur kegiatan dalam perencanaan saling berkaitan, sehingga secara otomatis juga keterlibatan perempuan

dalam kegiatan penulisan usulan ini hanya untuk mendengarkan serta ikut menyetujui usulan-usulan yang akan diajukan nantinya ke MAN di kecamatan.

Usulan-usulan berupa desain kegiatan sederhana yang telah ditetapkan pada musyawarah nagari perencanaan tersebut kemudian disusun dan dijadikan sebuah proposal kegiatan oleh Tim Penulisan Usulan (TPU). Dimana pengajuan proposal oleh nagari harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambaran dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran pembiayaannya.

Dalam pembuatan desain kegiatan, khususnya mengenai perkiraan besaran pembiayaan, juga cenderung lebih didominasi oleh laki-laki, perempuan dianggap kurang tahu serta kurang mengerti mengenai masalah ini, karena pembuatan desain ini juga berkaitan dengan berapa harga satu sak semen dan bahan-bahan bangunan lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh ketua UPK, Bapak Dedi Efendi :

“Untuk memperkirakan berapa harga bahan-bahan bangunan, misalnya semen, pasir dan lain-lain memang lebih diserahkan kepada laki-laki, karena perempuan kurang memahaminya”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Ujang, selaku pelaku PNPM-

MP Nagari Batu Bulek

*“Amak-mak mano lo tontu bapo harogo semen, yang tontu dek harogo lado, boe jo alok-alok dapu lain e. Ibu-Ibu mana tau mengenai harga semen, yang dia tahu hanya harga cabe, beras, bawang dan perlengkapan dapur lainnya”*

Padahal belum tentu juga perempuan tidak bisa dan tidak tahu mengenai masalah tersebut, justru jika perempuan diberi kesempatan untuk memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan mungkin akan ada sedikit pengurangan dalam penggunaan dana, karena biasanya perempuan lebih pintar menawar dari pada laki-laki.



Tahap kelima, Verifikasi Usulan. Merupakan tahapan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap nagari untuk didanai melalui PNPM-MP. penilaian ini dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan melihat pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yaitu :

1. Diutamakan lokasi nagari tertinggal
2. Lebih bermanfaat bagi Rumah Tangga Miskin
3. Berdampak meningkatnya kesejahteraan RTM
4. Dapat dikerjakan oleh masyarakat.

Dari 6 orang Tim Verifikasi hanya terdiri dari 2 orang perempuan, dari tahapan verifikasi tersebut hanya satu rekomendasi usulan dari perempuan yang dianggap layak untuk diajukan ke Musyawarah Antar Nagari Sosialisasi yaitu simpan pinjam, Namun pada dasarnya program SPP ini juga sudah mempunyai dana tersendiri. . Sementara usulan lain dari kelompok perempuan yaitu mengadakan pelatihan, masih dianggap belum penting dan lebih mengusulkan kegiatan lainnya. Dari Proses tersebut didapat dua usulan nagari untuk diajukan ke MAN di kecamatan yaitu, pembangunan Paud dan Rabat Beton Jalan Aur Duri.

Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada usulan khusus perempuan yang dianggap layak untuk diajukan dalam MAN di Kecamatan, diantaranya usulan perempuan untuk mengadakan pelatihan keterampilan belum disetujui untuk diajukan. Walaupun sebenarnya usulan yang akan diajukan ke kecamatan tersebut juga bermanfaat untuk kemajuan nagari.

#### **4.6. Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Perempuan Dalam PNPM-MP**

Penyebab rendahnya kualitas sumber daya perempuan dalam kegiatan pembanguana sebagian berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri (faktor internal), dan sebagian lagi berasal dari luar (faktor eksternal). Faktor internal perempuan antara lain masih rendahnya dan terbatasnya motivasi perempuan agar meningkatkan dirinya untuk maju, sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa kurang percaya diri, tidak berdaya dan tidak mandiri. Gerak perempuan juga terkendala oleh ukuran-ukuran obyektif dari sumber daya manusia, misalnya rendahnya pendidikan dan pengetahuan, terbatasnya wawasan, rendahnya keterampilan sebagian perempuan dalam berbagai bidang dan rendahnya derajat kesehatan perempuan.

Sedangkan faktor eksternal perempuan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komprehensifnya penterjemahan ajaran agama, aturan hukum dan kebijakan, serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias gender. Nilai-nilai budaya patriarki mengakibatkan perempuan terdiskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan yang berakibat terinternalisasinya sikap-sikap sebagai warga negara kelas dua. Akibatnya telah mempengaruhi cara perempuan mengembangkan konsep diri yang telah menghambat dirinya untuk maju.

Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan hanya dilihat dari faktor eksternal dan lebih difokuskan pada pemikiran pelaku dan pengelola PNPM-MP yang bersumber dari interpretasi budaya patriarki. Dari pemikiran-pemikiran dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap keterlibatan perempuan dalam PNPM-MP.



#### **4.5.1. Pemikiran-Pemikiran Budaya Patriarki mempengaruhi Keterlibatan Perempuan Dalam PNPM-MP**

Di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, budaya patriarki masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan gender. Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia dibentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bagi masyarakat tradisional, patriarki dipandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan adikodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Ihromi (1995:73) juga mengungkapkan bahwa determinis biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun diciptakan berbeda.

Begitu juga di lokasi penelitian, walaupun Nagari Batu Bulek menganut sistem kekerabatan matrilineal namun tetap saja yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Seperti yang dikemukakan oleh Suluah (2004 : 62) Perempuan dalam masyarakat minangkabau hanya mempunyai peran besar dalam bidang ekonomi, namun tidak dalam hal pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Dengan kata lain, perempuan dalam masyarakat Minangkabau tetap ter subordinasi karena kuatnya pemikiran-pemikiran yang bersumber dari interpretasi budaya patriarki.

Berdasarkan penelitian di lapangan ternyata pemikiran-pemikiran yang bersumber dari budaya patriarki telah melahirkan keterbatasan perempuan dalam segala hal termasuk dalam PNPM-MP. Walaupun dalam setiap kebijakan yang ada dalam PNPM-MP menekankan poin penting mengenai kesetaraan dan keadilan gender, namun dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata kebijakan tersebut dikalahkan oleh pemikiran-pemikiran budaya patriarki yang sudah terkonsep dengan matang pada pemikiran pelaku dan pengelola PNPM-MP. Dimana persepsi mengenai perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dipandang menjadi nilai-nilai dan norma tentang kepantasan peran, tanggung-jawab serta status laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk dalam PNPM-MP.

Dari hasil penelitian, pemikiran-pemikiran yang bersumber dari interpretasi budaya patriarki mempengaruhi tiga hal :

Pertama, tingkat kehadiran perempuan. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa tingkat kehadiran perempuan cenderung lebih sedikit dari pada laki-laki. Hal ini terjadi karena pengelola program cenderung mensubordinasikan dan kurang memberikan penghargaan kepada perempuan. Misalnya saja dalam pemberian undangan secara resmi, dimana undangan untuk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

Seperti yang dikemukakan oleh sekretaris UPK, Bapak HB :

Memang undangan yang diberikan lebih banyak untuk laki-laki dari pada perempuan.

Secara tidak langsung pengelola program semakin menegaskan interpretasi bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini terjadi karena



interpretasi bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Pemaknaan bahwa laki-laki adalah pemimpin membuat kedudukannya dalam masyarakat lebih diutamakan.

Kemudian lagi jika dilihat dari segi waktu pelaksanaan kegiatan, dimana kegiatan sering kali dilakukan pada malam hari. Mengenai hal ini, Fasilitator Pemberdayaan PNPM-MP, Bapak AS berpendapat bahwa kegiatan perencanaan cenderung dilakukan pada malam hari karena sebagian besar masyarakat bekerja dan mencari nafkah disiang harinya.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak IY, selaku Wali Nagari Batu Bulek :

Pada umunya masyarakat di nagari ini kan bermata pencaharian sebagai petani, sehingga mereka tidak akan bisa hadir jika kegiatan musyawarah dilakukan di siang hari. karena mereka bekerja.

Pengelola program kurang menyadari bahwa kegiatan perencanaan yang dilakukan pada malam hari justru menghambat akses perempuan untuk terlibat karena perempuan yang sudah berkeluarga susah untuk meninggalkan rumah dimalam hari, karena mereka mempunyai anak yang mungkin masih kecil-kecil untuk ditinggalkan.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu EE :

*Malam di paya ibu kaluaw anak ibu masih ketek-ketek. Kalau malam ibu susah untuk keluar karena anak ibu masih kecil-kecil.*

Hal ini didukung oleh pendapat Bapak UD :

*Kalau malam yo dak bisa ibu-ibu kaluaw do, nyak anak bakpo? jo siapa kan tingga. Kalau malam yang tentu ibu-ibu tidak bisa untuk berpergian, karena dengan siapa anaknya nanti ditinggalkan.*

Walaupun dilokasi penelitian menganut sistim kekerabatan matrilineal, dimana perempuan dikatakan sebagai pemimpin yang cerdas pandai. Kenyataannya

kedudukan perempuan dalam masyarakat masih relative jauh dari apa yang diamanatkan dalam adat Minangkabau tersebut. Penempatan perempuan sebagai pengelola warisan pusaka Minangkabau juga mengikat dan membatasi kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam masyarakat, karena seluruh persoalan yang ada di dalam rumah tangga harus menjadi tanggung jawab perempuan. Tugas perempuan justru ditegaskan dengan istilah *SDK* (*Sumur, Dapur, Kasur*). Dengan demikian, waktu perempuan lebih banyak tersita untuk mengurus dapur dan anak. Hal ini tentu berimplikasi terhadap berkurangnya akses serta aktivitas perempuan dalam kegiatan masyarakat.

Akibatnya pemberian kesempatan kepada perempuan untuk menjalankan tanggungjawab sosialnya sebagai manusia tentunya juga semakin berkurang. Sehingga, potensi besar yang dimiliki oleh perempuan sangat tidak berarti untuk digunakan. Dengan demikian, kontribusi perempuan dalam setiap kegiatan tak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemikiran-pemikiran semacam ini terus-menerus berkembang di lokasi penelitian, sehingga secara kodrati pula perempuan lebih cocok berada di rumah mengurus dapur dan anak, daripada harus berkecimpung dalam kegiatan masyarakat. Kondisi ini membuat perempuan tidak dapat mengembangkan dirinya.

Kedua, Peran perempuan dalam organisasi PNPM-MP. Dari hasil penelitian jumlah perempuan dalam organisasi PNPM-MP di Nagari Batu Bulek cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Dengan sedikitnya keterwakilan perempuan dalam organisasi PNPM-MP di Nagari Batu Bulek sedikit banyak tentu



juga mempengaruhi keterwakilan aspirasi perempuan dalam kegiatan perencanaan PNPM-MP, karena biasanya perempuan lebih mudah untuk berbicara dengan sesama perempuan. Dari wakil-wakil perempuan inilah yang nantinya akan mempertahankan atau mengajukan aspirasi serta usulan-usulan dari masyarakat perempuan.

Sedikitnya keterwakilan perempuan dalam organisasi PNPM-MP terjadi karena kapasitas perempuan sebagai ibu rumah tangga, sehingga pelaku-pelaku PNPM-MP berasumsi bahwa perempuan tidak mempunyai waktu banyak untuk melakukan kegiatan di masyarakat. Perempuan tidak bisa lepas dari tugas rumah tangganya.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak UD :

*Ibu-ibu nyo la banyak lo karojo di uma tangga, manyosa, manyapu, mangasuah anak. Jadi dak mungkin lo nyo kan banyak bakacimpuang dalam masyarakat do.* Perempuan memiliki tugas sendiri, seperti menyapu, memasak, mengasuh anak. Jadi wajar saja perempuan hanya memiliki waktu sedikit untuk berkecimpung dalam kegiatan masyarakat

Dalam pencalonan tersebut perempuan juga belum ditunjuk dan dipercayai untuk menduduki posisi utama sebagai ketua, sebagian besar yang diajukan sebagai calonnya adalah masyarakat laki-laki hanya ada satu orang perempuan yang ditunjuk untuk dicalonkan sebagai ketua. Berkembang pemikiran bahwa bahwa perempuan menduduki posisi kedua setelah laki-laki, baik di dalam rumah tangga, maupun dalam masyarakat. Hal ini juga berimplikasi dalam organisasi PNPM-MP di Nagari Batu bulek, akibatnya belum ada perempuan yang ditunjuk untuk menduduki posisi utama seperti ketua dalam organisasi PNPM-MP di nagari.

Dalam posisi ini peneliti bukan memaksakan bahwa perempuan harus menduduki posisi utama atau harus menjadi seorang pemimpin, tetapi kembali lagi

peneliti berpedoman pada ketentuan dalam PNPM-MP yang tidak membatasi siapapun untuk menduduki posisi sebagai pemimpin organisasi. Dari sini peneliti melihat bahwa pelaku-pelaku PNPM-MP di Nagari Batu Bulek belum mempercayai perempuan untuk memimpin atau menjadi ketua dalam organisasi PNPM-MP di Nagari Batu Bulek khususnya.

Perempuan lebih cenderung ditempatkan pada posisi kedua seperti bendahara, atau sebagai anggota saja, bahkan sekretaris yang biasanya diperankan oleh perempuan justru juga diambil oleh laki-laki. Perempuan cenderung ditempatkan pada posisi tersebut karena ada asumsi bahwa perempuan lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, ditambah lagi mereka sudah terbiasa mengelola keuangan dalam rumah tangga. Dalam hal pembuakan perempuan juga dianggap lebih teliti.

Seperti yang dikemukakan oleh ketua UPK, Bapak DE :

Perempuan sangat cocok sekali di tempatkan sebagai bendahara, karena mereka sudah terbiasa mengelola keuangan dalam rumah tangga

Berkembang pemikiran yang menganggap perempuan tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin, dimana pemikiran ini bersumber dari interpretasi atau pemaknaan pelaku-pelaku PNPM-MP terhadap budaya patriarki. Diantaranya perempuan dianggap kurang tegas dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk menjadi ketua harus mampu mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Berangkat dari pembuat keputusan yang dominan dalam keluarga adalah ayah sebagai kepala keluarga membawa peran tersebut dalam ranah pertemuan Nagari. Akhirnya perempuan tetap harus ikut keputusan dari pemimpinnya yaitu laki-



laki (suami), hal ini lah yang akhirnya mempengaruhi posisi perempuan dalam setiap kegiatan yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam kegiatan PNPM-MP.

Seperti yang dikemukakan oleh fasilitator, Bapak AS :

Dalam pemilihan ketua oraganisasi PNPM-MP di Nagari, memang tidak menutupi kemungkinan untuk perempuan menduduki posisi tersebut, namun hal ini tentu kita kembalikan lagi kepada masyarakatnya, karena yang memilih adalah mereka sendiri, dan memang masyarakat belum mempercayai perempuan untuk memimpin sepertinya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Wali Nagari Batu Bulek, Bapak Imran Yasir :

Saya sebenarnya tidak membedakan siapapun yang akan menjadi ketua, menurut saya sama saja, mau laki-laki ataupun perempuan, tetapi memang kita susah mengubah pemikiran-pemikiran anggora masyarakat, bahwa yang menjadi pemimpin harus laki-laki.

Perempuan dianggap lemah dan emosional sehingga mereka tidak bisa menjadi seorang pemimpin, perempuan dianggap tidak bisa berdebat untuk mempertahankan suatu yang diusulkan, sementara laki-laki dianggap lebih tegas, dan mampu berdebat untuk mempertahankan sesuatu. Itulah sebabnya laki-laki lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak NL, UJ dan DR anggota Masyarakat Nagari Batu Bulek :

*Ibu-ibu tukan paya kalau badebat, kalau laki-laki lobiah koe, jadi nyo bisa mampatahkan apo yang didebatkan. Ibu-ibu itu susah untuk berdebat, kalau laki-laki dia tegas, jadi bisa mempertahankan*

Hal yang sama juga dikemukakan oleh PL PNPM-MP, Bapak MY :

*Yo diakui kalau ibu-ibu tu dak bisa tegas, sobok e nyo punyo sifat kaibuan, yang paibo. Kalau ibu-ibu memang susah untuk tegas, karena dia mempunyai sifat keibuan yang lemah lembut.*

Kemudian juga ada pemikiran bahwa perempuan terikat dengan tugas rumah tangga sehingga susah untuk berpergian secara mendadak. Seorang ketua dituntut harus siap untuk berangkat kapan pun jika ada pertemuan atau acara-acara yang dilakukan secara mendadak. Sedangkan perempuan khususnya yang telah berkeluarga mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya masalah anak, pekerjaan rumah tangga dll. Inilah yang membatasi perempuan untuk bisa berpergian.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak AN, anggota masyarakat Nagari Batu Bulek :

*Kalau ibu-ibu poi, siapa yang kadapu, anak-anak dak lo tabiaso jo kami do, nyo la tabiaso jo ibu e.* Kalau ibu-ibu pergi siapa yang akan memasak, sementara anak-anak juga tidak mau kami yang mengurusinya, karena mereka telah terbiasa dengan ibu mereka

Adanya pemikiran-pemikiran yang keliru memandang bahwa mengasuh anak dan mengurus dapur diasumsikan sebagai kodrat perempuan. Akibatnya membatasi gerak-gerik perempuan untuk berkecimpung dalam masyarakat. Padahal, anggapan ini belum sepenuhnya benar. Sebab mengasuh anak dan mengurus dapur bukanlah kodrat, melainkan hasil konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat. Sejatinya, yang dimaksud dengan kodrat perempuan adalah yang berkaitan dengan faktor biologisnya, seperti menstruasi, hamil dan melahirkan.

Ketiga, kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan. Berangkat dari pembuat keputusan yang dominan dalam keluarga adalah ayah sebagai kepala keluarga membawa peran tersebut dalam ranah pertemuan PNPM-MP di Nagari.



Dimana perempuan kurang diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat, khususnya perempuan yang hanya berkedudukan sebagai istri/ibu rumah tangga.

Sebagian besar perempuan yang hadir dalam kegiatan perencanaan PNPM-MP justru adalah perempuan miskin yang hanya berkedudukan sebagai istri/ibu rumah tangga. Akibatnya keterlibatan mereka cenderung pasif, jarang sekali mereka berbicara untuk mengemukakan pendapat.

Sebenarnya sebutan sebagai ibu rumah tangga adalah suatu kehormatan. Sebutan yang melekat pada kaum perempuan yang telah berkeluarga. Perempuan sebagai ibu rumah tangga dituntut penuh tanggung jawab, tidak tersedia masa cuti, dan terkadang sulit mencari pengganti yang tepat. Akan tetapi perempuan sebagai ibu rumah tangga seringkali diasumsikan bahwa kehidupan perempuan tersebut tergantung kepada suami secara ekonomis. Implikasinya adalah pembagian peran dan kerja umumnya lebih menekankan pada gender. Rasionalitas, kekuatan fisik dan kemampuan laki-laki menjadi standar kepemimpinan dalam sebuah keluarga. Konstruksi semacam ini telah ter-*mindset* dalam benak hampir semua masyarakat kita, karena telah tersosialisasi dalam budaya yang berlangsung cukup lama. Laki-laki (suami) yang terposisi sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, dan perempuan (isteri) sebagai ibu rumah tangga, telah terpateri dalam benak masyarakat.

Kedudukan sosial perempuan sebagai istri yang mempunyai ketergantungan dalam ekonomi terhadap suami serta tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka tidak bisa merdeka dan leluasa dalam mengemukakan pendapat dalam keluarga. Padahal secara rasional, tentu mereka juga memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat sesuai dengan permasalahan mereka.

Akhirnya perubahan-perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan peran, akses, keterlibatan perempuan dalam PNPM-MP terkendala, karena pandangan pelaku-pelaku PNPM-MP, baik laki-laki atau bahkan kaum perempuan sendiri, yang melihat dari sisi kodrati adanya perbedaan secara fisik maupun psikologis antara perempuan dan lelaki. Pandangan ini tidak lain bersumber dari interpretasi para pelaku PNPM-MP terhadap budaya patriarki.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan keterlibatan perempuan dalam Tahapan Perencanaan PNPM-MP belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya keterlibatan perempuan baik secara kualitas (berbicara mengemukakan pendapat dan saran) maupun kuantitas (tingkat kehadiran). Peran perempuan dalam organisasi PNPM-MP di Nagari Batu Bulek juga masih sangat rendah dimana dari 27 orang anggota organisasi pelaku-pelaku PNPM-MP di Nagari Batu Bulek, hanya terdiri dari 10 orang perempuan, sementara anggota laki-laki ada 17 orang. Posisi perempuan dalam organisasi tersebut juga cenderung ditempatkan pada posisi-posisi kedua setelah laki-laki. Peran perempuan dalam organisasi masih diidentikan dengan tugas perempuan sehari-hari, misalnya, perempuan diposisikan sebagai bendahara, karena perempuan sudah terbiasa mengelola keuangan dalam rumah tangga.

Dalam hal pengambilan keputusan, perempuan juga belum terwakili secara adil. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan pada kegiatan perencanaan PNPM-MP di Nagari BatuBulek masih rendah. Berangkat dari pembuat keputusan yang dominan dalam keluarga adalah ayah sebagai kepala keluarga membawa peran tersebut dalam ranah pertemuan PNPM-MP di Nagari. Padahal secara rasional, perempuan juga memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat sesuai dengan permasalahan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata pemikiran-pemikiran yang bersumber dari interpretasi budaya patriarki yang telah melahirkan keterbatasan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan PNPM-MP. Walaupun dalam setiap kebijakan yang ada dalam PNPM-MP menekankan poin penting mengenai kesetaraan dan keadilan gender, namun dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata kebijakan tersebut dikalahkan oleh interpretasi budaya patriarki yang sudah terkonsep dengan matang dalam pemikiran pelaku-pelaku PNPM-MP. Selain itu peneliti juga menemukan faktor lainnya yaitu tingkat pendidikan, kedudukan sosial perempuan, serta keadaan ekonomi.

Adapun pemikiran-pemikiran tentang perempuan yang berkembang di lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemikiran bahwa kapasitas perempuan (bersifat kodrati) dalam melahirkan anak dijadikan rasional terhadap penentuan peranan bahwa perempuan hanya pantas berperan dalam kegiatan domestik. Perempuan dihadirkan sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak perlu banyak berkecimpung dalam masyarakat
2. Penguatan/pembenaran/turun menurun bahwa dengan adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai suatu pembenaran terhadap perbedaan hak dan kesempatan bagi keduanya : Perempuan sebagai ibu rumah tangga, dan laki-laki sebagai kepala keluarga.



3. Perempuan dianggap emosional sehingga susah dalam mengemukakan pendapat serta kurang tegas dalam pengambilan keputusan. Sedangkan laki-laki dianggap lebih rasional sehingga mudah mengemukakan pendapat, serta tegas dalam pengambilan keputusan
4. Kedudukan perempuan nomor dua setelah laki-laki. Perempuan dianggap kurang pantas menduduki posisi utama (ketua), karena perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menduduki posisi tersebut. Sebaliknya perempuan lebih cocok ditempatkan pada posisi kedua seperti bendahara karena mereka sudah terbiasa mengelola keuangan dalam rumah tangga.

Pemikiran semacam ini semakin lama semakin mengakar dalam pikiran pengelola dan pelaku-pelaku PNPM-MP. Sehingga membuat perempuan semakin terkurung, bahkan secara tidak sadar, menikmatinya. Akhirnya perubahan-perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan peran, akses, serta kontrol perempuan dalam PNPM-MP terkendala.

## **5.2. Saran**

1. Agar mencari jalan keluar untuk merubah cara pandang masyarakat tentang posisi dan peran perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti dunia pendidikan dan lembaga keagamaan.
2. Ketika keikutsertaan/keterlibatan perempuan sudah diterapkan, maka harus dilakukan upaya untuk mendukung keikutsertaan/keterlibatan perempuan. Sehingga

keterlibatan perempuan tidak cenderung menjadi pelengkap saja, melainkan mereka juga bisa aktif dalam kegiatan yang dilakukan.

3. Agar dilakukan penyadaran kritis kepada seluruh masyarakat laki-laki maupun perempuan akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teori

- Amir M.S. 1997. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Afrizal dkk, 2006. *Kemajuan Terkini Penelitian Klaster Sosial-Humaniora*. Yogyakarta: Kantor Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UGM
- Budiman, Arif. 1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta : PT Gramedia
- Bachtiar, Harsja W. 1984. "Negeri Taram: Masyarakat Desa Minangkabau". Dalam Koentjaraningrat (ed), *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Bainar. 1998. *Wacana Perempuan Dalam KeIndonesiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. Departemen PU.2007. *Buku Pedoman Umum PNPM*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2008. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP*. Jakarta
- Diklat Teknis Penyadaran Gender : *Awareness in Decentralization Era*.2008. Modul I : *Konsep dan Teori Gender*
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Putaka Pelajar Offset
- Ihromi. 1995. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Ihromi. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Johnson, Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Praktinya di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Moore, Henrietta . 1988. *Feminism And Antropologi*. Cambridge : Polity Press.
- Murniati dkk. 2004. *Getar Gender*. Magelang: Indonesia Tera.



- Mafruhah, Izza. 2009. *Multidimensi Kemiskinan*. Surakarta : UNS Press
- Poloma, Margaret. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Robert, Cambers. 1987. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta : LP3ES
- Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soetrisno. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta : Philosophy Press.
- Sherraden, Michael. 2006. *Aset Untuk Orang Miskin : Perspektif Usaha Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

### **Buku Metode**

- Alwasilah, Cahaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.
- Afrizal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Dari Pengertian Sampai Penulisan laporan*. Padang : Laboratorium Sosiologi FISIB UNAND
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana.

### **Jurnal**

- Agung aryani, gusti ayu. 2002. *Mengenal Konsep Gender (Permasalahan Dan Implementasinya Dalam Pendidikan)*. Dalam <http://www.jurnalperempuan.com> .Diakses tanggal 5 Januari 2010 pukul 10.30 WIB
- Aryani. 2002. *Gender Dan Permasalahannya*. Pusat studi wanita universitas udayana. Denpasar. Dalam <http://ejournal.unud.ac.id>. Diakses tanggal 18 Desember 2010 pukul 16.00 WIB



Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2004. *Bunga Rampai: Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, dan UNFPA.

Pusat Data dan Informasi Pertanian - Departemen Pertanian :2007-2008

Tim pusat studi wanita universitas udayana. 2003. *Konsep Gender Dan Pengarusutamaan Gender*. Materi sosialisasi gender dan pengarusutamaan gender untuk toga dan toma di provinsi bali. Dalam <http://ejournal.unud.ac.id>. Diakses tanggal 13 Januari 2010 pukul 15.30. WIB

### **Skripsi dan Tesis**

Latifa, Dela. 2009. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Kota Padang (Studi Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung)*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Universitas Andalas : Padang

Syahrial. 2008. *Efektifitas Modal Dana Bergilir Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Studi Kasus Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Padang*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Pascasarjana Universitas Andalas : Padang.

- Arun, Shoba. 2008. *Managing Assets and Vulnerability Contexts : Vistas Of Gendered Livelihoods Of Adfiasi Women In South India*. BWPI Working Paper 32.
- Bambang, Eka. 2007. NGO Forum Bahas Strategi Kesetaraan dan Keadilan. Dalam <http://iibn.indonesiadil.net/gdl>. Diakses tanggal 17 Maret 2010 pukul 20.00. WIB
- Gender Melalui BPFA dan MDGs. <http://www.jurnalperempuan.com/ind>. Diakses tanggal 12 Januari 2010 pukul 13.00 WIB
- Hadmadji, Sri .2000. *Aspek Gender Dalam Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia*. Makalah Dalam Seminar : "Aspek Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan". Jakarta. Dalam <http://tkpkri.org/component/option,com>. Diakses tanggal 2 Januari 2010 pukul 14.00 WIB
- Susanti, Mayavanie, Dwi. *Peran Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Dalam <http://www.docstoc.com/docs>. Diakses tanggal 23 Januari 2010. Pukul 13.30. WIB
- Syukrie, Sofyan Erna. 2003. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Denpasar. Dalam <http://iibn.indonesiadil.net/gdl>. Diakses tanggal 19 Februari 2010 pukul 11.00 WIB
- Sudirja, Rija. 2007. *Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Program Pembangunan Pertanian Di Pedesaan* : Artikel Internet. Pelatihan Partisipatory Rural Apraisal (Pra) Bagi Tenaga Pemandu Dinas/Lembaga Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Se-Indonesia Lembang, 8 S.D. 13 Juli 2007. Dalam [www.binaswadaya.org](http://www.binaswadaya.org). Diakses tanggal 25 Maret 2010 pukul 17.30 WIB.
- Sudjarwo, Imam, Astuti. 2007. *Pencitraan Peran Perempuan Dalam Pembangunan*. Dalam <http://cetak.bangkaapos.com/>. Diakses tanggal 28 Februari 2010 pukul 14.00 WIB
- Sasongko. 2009. *Konsep dan Teori Gender*. Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan BKKBN : Modul PJJ-PUG



## **Pedoman Wawancara**

### **Pengarusutamaan Gender Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan : Sebuah Studi Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)**

#### **Penjelasan :**

- a. Perkenalkan diri (nama, dan pekerjaan)
- b. Penjelasan mksud dan tujuan kedatangan

#### **I.Tempat dan Waktu Wawancara :**

1. Tempat Wawancara :
2. Waktu Wawancara :

#### **II. Identitas Informan :**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan :
5. Jabatan :

#### **☞ Untuk Pengelola PNPM-MP**

##### **A. Pengarusutamaan Gender Dalam PNPM-MP**

1. Menurut Bapak/Ibu apa itu pengarusutamaan gender ?
2. Menurut Bapak/Ibu apa tujuan pengerusutamaan gender ?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk implementasi pengarusutamaan gender dalam PNPM-MP ?

##### **B. Implementasi Pengerusutamaan Gender Dalam PNPM-MP**

1. Bagaimana tingkat kehadiran laki-laki dan perempuan dalam setiap alur kegiatan PNPM-MP ?

2. Bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keanggotaan kelembagaan masyarakat (seperti UPK, TPK, TPU dll).?
3. Bagaimana keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan PNPM-MP ?
4. Bagaimana keterlibatan laki-laki perempuan dalam mengemukakan pendapat, saran dalam setiap proses kegiatan?
5. Bagaimana keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan?

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Perempuan Dalam PNPM-MP**

#### **a. Pemikiran-Pemikiran Budaya Patriaki**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan dalam PNPM-MP?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan dalam PNPM-MP?
3. Menurut Bapak/Ibu dalam kegiatan apa saja seharusnya laki-laki dan perempuan dilibatkan, dan mengapa ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam organisasi PNPM-MP, pada posisi apa seharusnya laki-laki dan perempuan ditempatkan, dan mengapa?



**ca Untuk Pelaku-Pelaku PNPM-MP Di Nagari**

**A. Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam PNPM-MP**

**1. Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Kegiatan Perencanaan PNPM-MP (Musyawarah, Penggalan Gagasan)**

1. Apakah Bapak/Ibu diundang dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh PNPM-MP ?
2. Menurut Bapak/Ibu kapan biasanya pertemuan/musyawarah dalam PNPM-MP itu dilakukan?
3. Apakah Bapak/Ibu selalu hadir dalam setiap alur/tahapan kegiatan PNPM-MP
4. Menurut Bapak/Ibu siapa yang lebih dominan hadir dalam setiap alur/tahapan PNPM-MP?
5. Apa yang Bapak/Ibu lakukan ketika berada dalam ruangan pertemuan ?
6. Apakah Bapak/Ibu ikut mengemukakan pendapat atau saran dalam pertemuan/musyawarah tersebut?
7. Apakah saran Bapak/Ibu didengarkan dan dipertimbangkan ?
8. Apakah Bapak/Ibu mempunyai hambatan/halangan untuk mengemukakan pendapat ?
9. Menurut Bapak/Ibu siapa yang lebih dominan berbicara dan mengemukakan pendapat dalam pertemuan tersebut, bapak-bapak atau ibu-ibu, berikan penjelasan?
10. Menurut Bapak/Ibu saran siapa yang lebih bagus dan didengarkan dalam pertemuan tersebut, dan mengapa ?
11. Apakah Bapak/Ibu ikut dalam pengambilan keputusan ?

12. Menurut Bapak/Ibu siapa yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan?

13. Apakah keputusan tersebut sesuai dengan keinginan Bapak/Ibu dan mengapa?

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Perempuan**

### **1. Pemikiran-Pemikiran Budaya Patriarki**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga ?
2. Menurut Bapak/Ibu siapa yang paling dominan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, dan mengapa ?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat?
4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya fungsi laki-laki dan perempuan dalam keluarga ?
5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya fungsi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat ?
6. Menurut Bapak/Ibu siapa yang lebih berperan untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat ?
7. Menurut Bapak/Ibu siapa yang seharusnya terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat ?
8. Apakah Bapak/Ibu mempunyai hambatan/halangan untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat ? kalau iya mengapa ?

**Terima Kasih**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERANCANGAN *SPIN COATER* MENGGUNAKAN MOTOR DC  
*BRUSHLESS* DARI *HARDISK* BEKAS DENGAN LCD SEBAGIAN  
PENAMPIL KECEPATAN PERANCANGAN *SPIN COATER*  
MENGGUNAKAN MOTOR DC *BRUSHLESS* DARI *HARDISK* BEKAS  
DENGAN LCD SEBAGIAN**

**SKRIPSI**



**MUHAMMAD LUTHFI SYAWAL  
86135010**

**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2010**

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan : Dokumentasi peneliti saat wawancara dengan Wali Nagari Batu Bulek



Keterangan : Dokumentasi peneliti saat wawancara dengan Ketua UPK PNPM-MP



Keterangan : Dokumentasi peneliti saat wawancara dengan Sekretaris UPK dan salah seorang Informan Penelitian